



OMBUDSMAN
REPUBLIC INDONESIA

BIRO HUKUM, KERJA SAMA, DAN ORGANISASI

**LAPORAN
KINERJA
2023**

**TAHUN 2023
SEKRETARIAT JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kami bisa menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2023. Biro Hukum Kerja, Sama, dan Organisasi merupakan salah satu unsur dari dukungan manajemen yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Ombudsman RI yang mendukung Ombudsman Republik Indonesia, untuk melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang kemudian diperluas dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebagai perwujudan tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan dalam upaya menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik, disusun Laporan Kinerja Tahun 2023 sebagai sarana menyampaikan pelaksanaan program/kegiatan Ombudsman Republik Indonesia meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan publik.

Sehubungan dengan telah berjalannya pelaksanaan kegiatan pada Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sampai dengan bulan Desember 2023, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Tahun 2023. Semoga pencapaian kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi berdampak positif guna memberikan dukungan administrative prima kepada Ombudsman RI bagi perbaikan kualitas pelayanan publik.

Jakarta, 31 Desember 2023
Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi



Esti Budiyarti, S.H., M.H
NIP. 19700916 199403 2 003

IKHTISAR LAPORAN/ RINGKASAN EKSEKUTIF

Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan administrasi Hukum, Kerja sama dan Manajemen Organisasi. Laporan Kinerja (LKj) Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Biro dalam mencapai tujuan/sasaran. Adapun tujuan adanya penyusunan Laporan ini untuk memberikan informasi, pemutakhiran data dan dokumentasi kegiatan, serta sebagai bentuk pemantauan terhadap proses pelaksanaan kegiatan, progres pelaksanaan kegiatan, dan dan penyerapan anggaran Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi dalam wujud kinerja Biro Hukum Kerja Sama dan Organisasi.

Kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan hukum, kerja sama, pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi. Dalam mencapai sasaran terlaksananya fasilitasi layanan hukum, kerja sama, dan organisasi yang berkualitas diukur berdasarkan indikator dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro HKO yang terdiri dari: 1) Indeks Kinerja Biro Hukum, Kerjasama, dan Organisasi, dan 2) jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan.

Nilai indeks kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi tahun 2023 sebesar 3,2 dan 6 (enam) jumlah dokumen laporan yang terdiri dari 1 (satu) laporan kinerja dan 1 (satu) laporan tahunan, serta 4 (empat) laporan Triwulan. Kinerja Keuangan Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi dapat dilihat dari alokasi anggaran Rp. 3.469.263.000,00 direalisasikan Rp. 3.434.138.151. (98,99%), dengan tercapainya semua target di tahun 2023, terdapat efisiensi sebesar Rp. 35.124.849,00 (0,98%).

DAFTAR ISI

<u>KATA PENGANTAR</u>	2
<u>IKHTISAR LAPORAN/ RINGKASAN EKSEKUTIF</u>	3
<u>DAFTAR ISI</u>	4
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	5
<i>Latar Belakang</i>	5
<i>Kedudukan dan Fungsi</i>	6
A. <i>Struktur Organisasi dan Tata Kerja</i>	7
B. <i>Dasar Hukum</i>	8
C. <i>Tujuan</i>	9
D. <i>Ruang Lingkup</i>	9
<u>BAB II RENCANA KINERJA</u>	10
A. <i>Indikator Kinerja Utama</i>	10
B. <i>Perjanjian Kinerja</i>	10
<u>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</u>	11
A. <i>Analisis Kinerja</i>	11
B. <i>Kegiatan Yang Dilaksanakan</i>	11
a. <i>Kelompok Hukum</i>	15
1) <i>Tim Kerja Perancangan Peraturan Perundang-Undangan</i>	15
2) <i>Tim Kerja Advokasi dan Ajudikasi</i>	20
3) <i>Tim Kerja Dokumentasi dan Diseminasi</i>	25
b. <i>Tim Kerja Sama</i>	43
1) <i>Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri</i>	43
2) <i>Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri</i>	48
c. <i>Tim Kerja Sama Organisasi dan Fasilitas Reformasi Birokrasi</i>	66
1) <i>Fasilitas Kelembagaan</i>	66
2) <i>Fasilitasi Reformasi Birokrasi</i>	70
3) <i>Fasilitasi Tatalaksana</i>	91
C. <i>Kinerja Anggaran</i>	103
<u>BAB IV PENUTUP</u>	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik yang baik sangat diperlukan, namun hal tersebut harus didasari oleh peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian pelaksanaan tugas dan fungsi. Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia untuk memaksimalkan dukungan administratif kepada Ombudsman Republik Indonesia.

Pelaksanaan tugas dukungan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal Ombudsman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman Republik Indonesia;
- b. pelayanan administrasi perencanaan, penyusunan laporan, dan keuangan Ombudsman Republik Indonesia;
- c. pelayanan administrasi hukum, organisasi, dan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah terkait, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- d. pelayanan kehumasan, teknologi informasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta kepustakaan;
- e. penyelenggaraan kegiatan administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, keprotokolan, tata usaha, sarana dan prasarana Ombudsman Republik Indonesia; dan
- g. penyelenggaraan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman.

Sekretariat Jenderal Ombudsman terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b. Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi;
- c. Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- d. Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi;
- e. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum; dan
- f. Inspektorat.

B. Kedudukan dan Fungsi

Kedudukan Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi diatur dalam Bagian Ketiga Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi, diseminasi hukum, advokasi, dan administrasi ajudikasi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama;
- c. koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- d. pelaksanaan administrasi Biro.

C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI
BIRO HUKUM, KERJA SAMA, DAN ORGANISASI



Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan hukum, kerja sama, pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi dibantu oleh Subbagian Tata Usaha Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi ada 29 (dua puluh sembilan) orang yaitu 1 (satu) orang Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi, 2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Utama, 1 (satu) Orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 2 (dua) orang Fungsional Ahli Madya, 5 (lima) orang Fungsional Ahli Muda, 2 (dua) orang Fungsional Ahli Pratama dan 16 (enam belas) orang fungsional umum.

Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan, Jenis Kelamin, dan Penempatan:

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S3	2
2.	S2	4
3.	S1/D4	13
4.	D3	9
5.	SMA	1

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	14
2.	Perempuan	15

No.	Pegawai Perwakilan	Jumlah
1.	PNS	2

No.	Pegawai Pusat	Jumlah
1.	PNS	28
2.	Pramubakti	1

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.

E. Tujuan

Tujuan dari pembuatan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini adalah untuk mengetahui/ mengevaluasi sampai sejauh mana program kerja yang telah dilaksanakan oleh Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi, apakah dapat mencapai target dan apakah ada hambatan-hambatan yang dialami dalam melaksanakan program kerja tersebut.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembuatan Laporan kinerja Tahun 2023 Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi Tahun 2023 sesuai dengan tugas, dan fungsi yang ada pada Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.

BAB II
RENCANA KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Program kerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang ada pada Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi Tahun 2023.

Indikator kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi tahun 2020-2024 untuk mengukur capaian sasaran sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terlaksanannya fasilitasi layanan Hukum, Kerja Sama, dan Manajemen Organisasi yang berkualitas	Indeks Kinerja Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi.	Indeks (skala 1-4)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,1

B. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka pengukuran kinerja, Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi telah menetapkan perjanjian kinerja yang harus dicapai pada tahun 2023 dengan memperhatikan sumber daya dan sumber dana yang ada. Sasaran indikator, dan target kegiatan Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi tahun 2023 ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terlaksanannya fasilitasi layanan Hukum, Kerja Sama, dan Manajemen Organisasi yang berkualitas	Indeks Kinerja Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi. a. Aspek Implementasi (33,3%) b. Aspek Manfaat (66,7%)	3,1

	Jumlah dokumen laporan kinerja, triwulan, dan tahunan	6

Gambar 1.1
Perjanjian Kinerja
Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIRO HUKUM, KERJA SAMA, DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yuni Susita Dewi
Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi;
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suganda Pandapotan Pasaribu
Jabatan : Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,
Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001

PLT. KEPALA BIRO HUKUM, KERJA SAMA, DAN ORGANISASI,
Yuni Susita Dewi
NIP. 197406281999032009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIRO HUKUM, KERJA SAMA, DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terlaksananya Fasilitas Layanan Hukum, Kerja Sama, dan Manajemen Organisasi yang Bermutu	Indeks Kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi - Aspek Implementasi (33,3%) - Aspek Manfaat (66,7%)	3,1
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja, Triwulan, dan Tahunan	6

KRORO

	Anggaran
KRO : Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 2.014.513.000,00
RO1 Layanan Hukum	Rp. 422.627.000,00
RO2 Layanan Dukungan Masyarakat	Rp. 1.213.360.000,00
RO2 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp. 378.526.000,00
Jumlah	Rp. 2.014.513.000,00

Jakarta, Januari 2023

SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,
Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001

PLT. KEPALA BIRO HUKUM, KERJA SAMA, DAN ORGANISASI,
Yuni Susita Dewi
NIP. 197406281999032009

a) Revisi Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi

PERYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIRO HUKUM, KERJA SAMA, DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Esti Budiyarti
 Jabatan : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi
 selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suganda Pandoporan Pasaribu
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
 selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

	Jakarta, Desember 2023
SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,	KEPALA BIRO HUKUM, KERJA SAMA, DAN ORGANISASI,
Suganda Pandoporan Pasaribu NIP. 197309161993111001	Esti Budiyarti NIP. 197009161994032003

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIRO HUKUM, KERJA SAMA, DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terlaksananya Fasilitas Layanan Hukum, Kerja Sama, dan Manajemen Organisasi yang Berkualitas	Indeks Kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi - Aspek Implementasi (33,3%) - Aspek Manfaat (66,7%)	3,1
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja, Triwulan, dan Tahunan	6

KRO/RO	Anggaran
KRO : Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 3.469.263.000,00
RO1 : Layanan Hukum	Rp. 897.827.000,00
RO2 : Layanan Hubungan Masyarakat	Rp. 2.202.500.000,00
RO3 : Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp. 368.936.000,00
Jumlah	Rp. 3.469.263.000,00

	Jakarta, Desember 2023
SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,	KEPALA BIRO HUKUM, KERJA SAMA, DAN ORGANISASI,
Suganda Pandoporan Pasaribu NIP. 197309161993111001	Esti Budiyarti NIP. 197009161994032003


RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIRO HUKUM, KERJA SAMA, DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN			
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
Terlaksananya Fasilitas Layanan Hukum, Kerja Sama, dan Manajemen Organisasi yang Berkualitas	Indeks Kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi	3,1	0,5	1,2	1,7	3,1
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja, Triwulan, dan Tahunan	6	3	1	1	1

Jakarta, Desember 2023
 KEPALA BIRO
 HUKUM, KERJA SAMA, DAN ORGANISASI,

Esti Budiyarti
 NIP. 197009161994032003

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Kinerja

Kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi tahun 2023 diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang diharapkan. Capaian indeks kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi tahun 2023 telah memenuhi target dengan nilai indeks 3,2 (100%). Jumlah dokumen laporan yang telah disusun: 1 laporan kinerja, 4 laporan triwulan, dan 1 laporan tahunan. Capaian jumlah dokumen laporan yang telah disusun belum memenuhi target dengan jumlah 6 laporan (100%). Capaian kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi tahun 2023 yang ditampilkan dalam matriks sebagai berikut:

a) CAPAIAN KINERJA BIRO HUKUM, KERJASAMA DAN ORGANISASI TAHUN 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terlaksananya Fasilitasi Layanan Hukum, Kerjasama, dan Manajemen Organisasi yang Berkualitas	Indeks Kinerja Biro Hukum, Kerjasama dan Organisasi - Aspek Implementasi (33,3%) 1. Capaian Rincian Output 2. Nilai Efisiensi Unit Kerja 3. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 4. Penyerapan Anggaran - Aspek Manfaat (66,7%)	3,1	3,2	100 %
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Triwulan, dan Tahunan	6	6	100 %

b) Indeks Kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Aspek Implementasi: 33,33% Aspek Implementasi	2,441482502	2,419486796	2,617460835	2,743163068	2,75916798	2,92	3,060174753	3,168885215	3,256198719	3,333427381	3,336626668	3,248747443
	0											
Aspek Implementasi (%)	25,30561727	23,65428797	38,51720386	47,95430841	49,1558784	61,24773393	71,75398444	79,91543059	86,47049839	92,26844602	92,50863275	85,91109334
Aspek Manfaat (%)	78,876	78,876	78,876	78,876	78,876	78,876	78,876	78,876	78,876	78,876	78,876	78,876

Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
Aspek Implementasi				
Layanan Hukum	6	Dokumen	6	100 %
Layanan Hubungan Masyarakat	19	Laporan	19	100 %
Layanan Organisasi dan tata Kelola Internal	5	Laporan	5	100 %

c) Capaian Perjanjian Kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi

Indikator	Target	Bobot	Realisasi	Capaian(%)
Aspek Manfaat				
Indeks Kepuasan Layanan Organisasi dan Tata Laksana	3 (Skala 4)	20%	3,5	0,875
Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	80	20%	95	0,95
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Hukum	2,70 (Skala 4)	10%	3,215	0,803
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kerja Sama	3 (Skala 4)	10%	3,3	0,825
Nilai SAKIP Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi	75	10%	73,75	0,7375
Indeks Kepuasan Layanan Magang	3 (Skala 4)	5%	3,45	0,8625
Tingkat Kepatuhan Kode Etik dan Kode Perilaku di Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi	B	5%	A	1
Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK terhadap Pegawai pada Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi	100%	5%	100	1
Nilai Pengelolaan Arsip Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi	78,26 (Skala 100)	5%	88,02	0,8802
Rasio Pegawai yang Meningkatkan Kinerjanya melalui <i>Coaching/ Mentoring/Counseling</i> (CMC)	75%	5%	84	0,84
Persentase Tindak Lanjut Unit Kerja atas Temuan Aduan dan Saran Penjaminan Mutu	100%	5%	100	1

d) Nilai Efisiensi Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi

Nilai Efisiensi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Oket	Nov	Des
5093	Fasilitas Hukum, Kerja Sama dan Organisasi											
	49,64%	58,76%	52,84%	71,11%	68,42%	84,49%	93,93%	100,00%	100,00%	100,00%	88,88%	91,08%
5093.EBA.997	Layanan Hukum											
Penyerapan	1,83%	6,75%	36,00%	19,96%	34,38%	25,24%	35,19%	37,60%	44,20%	58,17%	66,32%	99,90%
Capaian RI	0,00%	0,00%	0,00%	16,67%	16,67%	33,33%	50,00%	66,67%	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%
Capaian RI yang dipriorit	-0,00%	0,00%	0,00%	16,67%	16,67%	33,33%	50,00%	66,67%	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%
Efisiensi	-1,83%	-6,75%	-36,00%	-1,21%	-7,71%	8,10%	34,81%	29,07%	59,13%	43,83%	33,68%	0,10%
Efisiensi yang diprioritang	-1,83%	-6,75%	-36,00%	-3,29%	-7,71%	8,10%	34,81%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,10%
Nilai Efisiensi	49,38%	53,12%	9,99%	41,77%	90,72%	70,34%	87,89%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,24%
5093.EBA.998	Layanan Hubungan Masyarakat											
Penyerapan	3,63%	6,74%	10,19%	10,46%	14,76%	15,09%	18,73%	27,15%	36,34%	46,49%	62,75%	98,90%
Capaian RI	0,00%	0,00%	20,53%	21,05%	31,58%	42,11%	52,63%	57,89%	68,42%	78,95%	89,47%	100,00%
Capaian RI yang dipriorit	-0,00%	-0,00%	20,53%	21,05%	31,58%	42,11%	52,63%	57,89%	68,42%	78,95%	89,47%	100,00%
Efisiensi	-3,63%	-6,74%	0,34%	10,59%	16,82%	27,02%	33,90%	30,74%	31,18%	52,46%	6,72%	1,10%
Efisiensi yang diprioritang	-3,63%	-6,74%	0,34%	10,59%	16,82%	28,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	6,72%	1,10%
Nilai Efisiensi	40,58%	53,15%	50,84%	76,49%	92,09%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	86,80%	92,76%
5093.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal											
Penyerapan	0,00%	0,00%	1,40%	1,97%	7,00%	26,82%	42,08%	42,08%	42,08%	56,63%	84,32%	99,90%
Capaian RI	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capaian RI yang dipriorit	-0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Efisiensi	0,00%	0,00%	18,60%	18,03%	13,00%	11,38%	17,92%	17,92%	17,92%	48,37%	35,68%	0,10%
Efisiensi yang diprioritang	-0,00%	0,00%	18,60%	18,03%	13,00%	11,18%	17,52%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,10%
Nilai Efisiensi	50,00%	56,80%	86,49%	95,04%	82,49%	82,86%	94,81%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,24%

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

a. Kelompok Hukum

Kelompok Hukum yang terdiri dari Tim Kerja Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Tim Kerja Dokumentasi dan Diseminasi Hukum dan Tim Kerja Advokasi Hukum dan Ajudikasi, pada Tahun 2023 telah melaksanakan Program Kerja Kelompok Hukum.

1) Tim Kerja Perancang Peraturan Perundang-Undangan;

a) Program Legislasi Ombudsman RI;

Program Legislasi Ombudsman RI Prioritas Tahun 2023. Berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 345 Tahun 2022 tentang Program Legislasi Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Ombudsman Republik Indonesia Prioritas Tahun 2023, prioritas penyelesaian peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
- b. Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia;
- c. Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah;

- d. Rancangan Peraturan Ombudsman tentang Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan;
- e. Rancangan Peraturan Ombudsman tentang Kode Etik dan Disiplin Insan Ombudsman Republik Indonesia;
- f. Rancangan Peraturan Ombudsman tentang Pemberian Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia;
- g. Rancangan Peraturan Ombudsman tentang Satu Data Ombudsman Republik Indonesia;
- h. Rancangan Peraturan Ombudsman tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

Capaian Tim Kerja Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Tahun 2023
Program legislasi Prioritas Tahun 2023

a. Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008

NO.	TAHAPAN	KETERANGAN
1	Pembentukan Tim Pengusul Substansi Perubahan UU 37 Tahun 2008	Ditetapkan melalui Keputusan Ketua Nomor 12 Tahun 2023 (TTD tanggal 20 Januari 2023).
2	Penyusunan Bahan Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman	dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2023 s.d. tanggal 2 Februari 2023.
3	Pertemuan dengan Pusat Pemantauan dan Evaluasi Badan Keahlian DPR RI	dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2023. Laporan disampaikan pada tanggal 11 Januari 2023.
4	Pertemuan dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI	dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2023. Laporan disampaikan pada tanggal 31 Januari 2023.
5	Rapat Pleno Pembahasan RUU 37 Tahun 2008 usulan Ombudsman	dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 Februari 2023.
6	Finalisasi (perapihan) RUU 37 Tahun 2008 usulan Ombudsman hasil Rapat Pleno	dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 Februari 2023.
7	Pengiriman RUU 37 Tahun 2008 usulan Ombudsman hasil Rapat Pleno	dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2023
8	Penyusunan Bahan untuk menghadiri undangan dari Badan Keahlian DPR RI dalam rangka Finalisasi Buku Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	dilaksanakan pada 15 Maret 2023.
9	Menghadiri undangan dari Badan Keahlian DPR RI dalam rangka Finalisasi Buku Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	Narasumber Bp. Dominikus Dalu. Dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2023 (ST Nomor: 229/HK.01/III/2023).
10	Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bersama dengan Badan Legislasi DPR RI	dilaksanakan di Provinsi Riau dan Provinsi DI Yogyakarta pada tanggal 21 Maret 2023.
11	Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI dengan agenda Presentasi Kepala Badan Keahlian Setjend DPR RI terkait penyusunan RUU tentang Ombudsman RI	dilaksanakan di Ruang Rapat Badan Legislasi Nusantara I Lantai I tanggal 28 Maret 2023

TRIWULAN II		
1	RDP oleh Badan Legislasi DPR RI mengundang Pimpinan Ombudsman.	Dilaksanakan Tanggal 30 Juni 2023. Tindak lanjut dari kegiatan ini akan segera dikirimkan masukan tertulis kepada Baleg DPR sesuai kesimpulan dalam RDP tersebut.
2	Penyusunan konsep jawaban tertulis RDP	1. Pengumpulan data dalam kerangka jawaban pada tanggal 8-9 Juni 2023 2. Konsep pertama kali dibahas pada tanggal 13 Juni 2023 (Ruang AW) 3. Tanggal 23 Juni 2023 dikirimkan via nota dinas untuk permohonan persetujuan rapat pleno.
3	Input masukan Ketua Ombudsman dan pembahasan bersama dengan Wakil Ketua	Dilaksanakan Tanggal 3 Juli 2023
TRIWULAN IV		
1	Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk referensi DIM dari Pemerintah	20 - 22 November 2023
2	Pembahasan bersama KemenPANRB	30 November 2023
3	Penyusunan kajian akademis penguatan DIM	4 Desember 2023

b. Rancangan Peraturan Presiden

NO.	Rancangan	Tahapan
TRIWULAN I		
1	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia	1. Telah tersusunnya Naskah Akademik dari Biro SDMU; 2. Penyampaian Naskah Akademik ke Kementerian PAN RB melalui surat Ketua Ombudsman Nomor B/62/HK.02.02/II/2023 tanggal 16 Januari 2023; 3. Rapat Pembahasan Kedudukan Keuangan Kepala Perwakilan dan Asisten Ombudsman yang diprakarsai oleh Kemen PAN RB pada tanggal 5 April 2023.
2	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah	1. Telah tersusunnya Naskah Akademik dari Biro SDMU; 2. Penyampaian Naskah Akademik ke Kementerian PAN RB melalui surat Ketua Ombudsman Nomor B/62/HK.02.02/II/2023 tanggal 16 Januari 2023; 3. Rapat Pembahasan Kedudukan Keuangan Kepala Perwakilan dan Asisten Ombudsman yang diprakarsai oleh Kemen PAN RB pada tanggal 5 April 2023.

PROGRESS RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG GAJI ASISTEN DAN RPERPRES TENTANG		
NO.	TAHAPAN	KETERANGAN
TRIWULAN I		
TRIWULAN II		
1	Pembahasan penguatan substansi NA bersama Tim Penyusun	5-7 Juni 2023
2	Penyusunan Revisi NA	8 Juni 2023
3	Penyampaian Revisi NA ke KemenpanRB	13 Juni 2023
TRIWULAN III		
1	Pre Job Assessment	9 Agustus 2023
2	Job Assessment	29 Agustus 2023 (Kepala Perwakilan) dan 6 September 2023 (Asisten)
3	Penyampaian Kartas Kerja hasil Job Assessment	18 September 2023
TRIWULAN IV		
1	Pertemuan dengan Kemenkum	01 November 2023
2	Audiensi ke KemenpanRB	22 Desember 2023

c. Rancangan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia

NO.	JUDUL	PERIODE	TANGGAL	TAHAPAN
1	Rancangan Peraturan Ombudsman tentang Satu Data Ombudsman Republik Indonesia	Triwulan I	11 Januari 2023	Rapat tindak lanjut hasil uji publik Rancangan Peraturan Ombudsman tentang Satu Data Ombudsman Republik Indonesia
			13 Januari 2023	Penyampaian persetujuan Rapat Pleno terkait harmonisasi Rancangan Peraturan Ombudsman tentang Satu Data Ombudsman
			18 Januari 2023	Pembahasan dengan Unit Pengusul (finalisasi)
			29 Maret 2023	Pembahasan bersama Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Pengampu Biro HKO tindak lanjut penyampaian dalam Rapat Pleno
			13 Maret 2023	Permohonan Persetujuan Tindak Lanjut Rancangan Peraturan Ombudsman tentang Satu Data Ombudsman Republik Indonesia
			29 Maret 2023	Rapat Pembahasan dengan Unit Pengusul
		Triwulan II	29 Mei 2023	Sudi Tinju ke Satu Data Kementerian Hukum dan HAM
			13 Juni 2023	Penyusunan urgensi penguatan substansi RPO
			23 Juni 2023	Permohonan persetujuan Harmonisasi ke Rapat Pleno
		Triwulan III	6 Juli 2023	Pembahasan rencana tindak lanjut dengan Pemrakarsa
			7 Juli 2023	Penyampaian Nota Dinas Persetujuan Rapat Pleno
				Penyusunan surat permohonan harmonisasi untuk dikirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM
			10 Juli 2023	Permohonan Harmonisasi
			22 Agustus 2023	Harmonisasi
			26 September 2023	Selesai Harmonisasi
		Triwulan IV	29 September 2023	Proses Pengajuan Penetapan
			18 Oktober 2023	Penetapan oleh Ketua Ombudsman
			17 Oktober 2023	Permohonan Pengundangan
20 Oktober 2023	Pengundangan di Berita Negara			

2	Rancangan Peraturan Ombudsman tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Ombudsman Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman	Triwulan I	27 Februari 2023	Penyusunan Daftar Inventaris Masalah
			28 Februari 2023	Penyusunan draf RPO
		Triwulan II	10 Maret 2023	Penyampaian Permohonan Persetujuan Rapat Pleno untuk dilaksanakan Proses Permohonan Masukan
			15 Maret 2023	Uji Publik dalam Rapat Pimpinan
			3 - 9 Mei 2023	Permohonan masukan melalui email
		Triwulan III	10 - 12 Mei 2023	Kompilasi Hasil Masukan
			26-28 Juli 2023	Pembahasan dengan Tim
			29 Juli 2023	Penyampaian Pleno II
			16 Agustus 2023	Penyampaian Pleno III
			29 Agustus 2023	Pembahasan dengan Anggota Ombudsman PIC (Hery Susanto)
			15 September 2023	Permohonan Harmonisasi
		Triwulan IV	19 Oktober 2023	Harmonisasi
			01 November 2023	Selesai Harmonisasi
			01 November 2023	Proses Pengajuan Penetapan
24 November 2023	Penetapan oleh Ketua Ombudsman			
25 November 2023	Permohonan Pengundangan			
27 November 2023	Pengundangan di Berita Negara			

3	Rancangan Peraturan Ombudsman tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan	Triwulan II	6 - 13 April 2023	Permohonan Masukan Unit Kerja
			16 - 28 April 2023	Penyusunan Kompilasi Hasil Masukan RPO oleh Kelompok Hukum
			3 - 9 Mei 2023	Permohonan Masukan Unit Kerja
			10 - 12 Mei 2023	Kompilasi Hasil Masukan
			23 Mei 2023	Uji Publik Pembahasan Hasil Kompilasi Masukan (Kedua)
			12 Juni 2023	Uji Publik Pembahasan Hasil Kompilasi Masukan (Kedua)
			16 Juni 2023	Penyampaian Persestiaan Rapat Pleno terkait harmonisasi
			19 Juni 2023	Pembahasan dalam Rapat Pleno hasil untuk dilakukan pembahasan kembali bersama Pimpinan dan seluruh Insan Ombudsman
			10 Agustus 2023	Permohonan masukan ke-2
		Triwulan III	16 Agustus 2023	Penyampaian Pleno dan mendapatkan persetujuan pleno untuk lanjut ke harmonisasi
			08 September 2023	Pembahasan pra harmonisasi dengan Tim
			15 September 2023	Finalisasi draf pra harmonisasi
		Triwulan IV	19 Oktober 2023	Permohonan Harmonisasi
			27 November 2023	Harmonisasi I
			08-09 Desember 2023	Harmonisasi II
			20 Desember 2023	Selesai Harmonisasi
			23 Desember 2023	Proses Pengajuan Penetapan
			28 Desember 2023	Penetapan oleh Ketua Ombudsman
			29 Desember 2023	Permohonan Pengundangan
29 Desember 2023	Pengundangan di Berita Negara			
4	Rancangan Peraturan Ombudsman tentang Disiplin Pegawai Ombudsman Republik Indonesia	Triwulan III	29 Agustus 2023	Pembahasan urgent RPO
			1 September 2023	
			01 September 2023	Proses penyusunan draf
5	Rancangan Peraturan Ombudsman tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia	Triwulan III	1 - 15 September 2023	Penyusunan Konsep Rancangan
			16 - 18 September 2023	Pembahasan Konsep Rancangan
		Triwulan IV	5 - 7 November 2023	Pembahasan Rancangan oleh Kelompok Hukum
			8 - 16 November 2023	Permohonan Masukan Unit Kerja
				Uji Publik Pembahasan hasil kompilasi Masukan

Produk hukum diluar Program Legislasi Ombudsman RI Prioritas Tahun 2023

yang telah diselesaikan sampai dengan desember tahun 2023, terdiri dari;

- 60 (Enam Puluh) MOU yang telah di reviu.
- 19 (Sembilan Belas) PKS yang telah di reviu.
- 4 (Empat) telaah Peraturan Perundang-undangan.
- 11 (Sebelas) Surat Edaran yang telah dibuat.
- 112 (Seratus Dua Belas) Surat Keputusan Ketua yang telah dibuat.
- 41 (Empat Puluh Satu) Surat Keputusan Sekretaris Jenderal yang telah dibuat.
- 3 (Tiga) Peraturan Sekretaris Jenderal.

Daftar Jumlah Produk Hukum Tahun 2023

No	Layanan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	TOTAL
1	RPO	1	1	2	1	5
2	RK Ketua Ombudsman	29	40	26	17	112
3	RSE Ketua Ombudsman	1	3	3	4	11
4	R Instruksi Ketua Ombudsman	6	0	0	0	6
5	RPersekjen	2	0	1	0	3
6	RK Sekjen Ombudsman	9	18	9	5	41
7	RSE Sekjen Ombudsman	0	0	1	0	1
8	R Naskah Perjanjian	35	7	23	14	79
9	Telaahan Staf	2	0	0	1	3
JUMLAH						261

2) Tim Kerja Advokasi dan Ajudikasi;

a) Terlaksananya fasilitasi penyiapan bahan advokasi, dan administrasi ajudikasi.

Jumlah kegiatan pendampingan advokasi litigasi, dan non litigasi yang berjumlah 59 (Lima Puluh Sembilan), yang terdiri dari;

1. Menghadiri sidang kedua di PTUN Jakarta terkait Gugatan terhadap Ombudsman RI di PTUN Jakarta Perkara Nomor: 418/G/2022/PTUN.JKT dengan agenda pembacaan Gugatan.
2. Membuat Jawaban Tergugat dalam Perkara Nomor: 418/G/2022/PTUN.JKT
3. Menghadiri sidang ketiga di PTUN Jakarta terkait Gugatan terhadap Ombudsman RI di PTUN Jakarta Perkara Nomor: 418/G/2022/PTUN.JKT dengan agenda penyampaian Jawaban Tergugat.
4. Menghadiri pemeriksaan terkait tindak pidana pemalsuan surat Ombudsman Republik Indonesia di Polda Metro Jaya, Laporan Polisi Nomor: LP/B/4810/IX/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA.
5. Menghadiri sidang keempat di PTUN Jakarta terkait Gugatan terhadap Ombudsman RI di PTUN Jakarta Perkara Nomor: 418/G/2022/PTUN.JKT dengan agenda penyampaian Jawaban Tergugat.
6. Melaksanakan perjalanan dinas ke Bandung dalam rangka pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku di lingkungan Ombudsman RI.
7. Melaksanakan perjalanan dinas ke Aceh dalam rangka koordinasi dengan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh dan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh terkait penyelesaian gugatan yang diajukan oleh Sdri. Rosmiati terhadap Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh perkara nomor: 37/G/TF/2022/PTUN.BNA.
8. Menghadiri sidang kelima di PTUN Jakarta terkait Gugatan terhadap Ombudsman RI di PTUN Jakarta Perkara Nomor: 418/G/2022/PTUN.JKT dengan agenda penyampaian Replik Penggugat.
9. Membuat Duplik Tergugat dalam Perkara Nomor: 418/G/2022/PTUN.JKT
10. Menghadiri sidang keenam di PTUN Jakarta terkait Gugatan terhadap Ombudsman RI di PTUN Jakarta Perkara Nomor: 418/G/2022/PTUN.JKT dengan agenda penyampaian Duplik Tergugat.
11. Membuat Bukti Surat Tergugat dalam Perkara Nomor: 418/G/2022/PTUN.JKT
12. Pendampingan pemeriksaan penyidikan terhadap saksi Stefanus Lugas Prastowo terkait tindak pidana pemalsuan surat Ombudsman Republik Indonesia di Polda Metro Jaya, Laporan Polisi Nomor: LP/B/4810/IX/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA.

13. Menghadiri panggilan sidang PTUN Jakarta dalam perkara nomor: 418/G/2022/PTUN.JKT agenda penyerahan barang bukti dari tergugat (sidang ketujuh).
14. Menghadiri panggilan sidang PTUN Jakarta dalam perkara nomor: 418/G/2022/PTUN.JKT agenda penyerahan barang bukti dari Tergugat (sidang kedelapan).
15. Pendampingan saksi di Polda Metro Jaya
16. Membuat Tambahan Bukti Surat Tergugat dalam Perkara Nomor: 418/G/2022/PTUN.JKT
17. Menghadiri panggilan sidang PTUN Jakarta dalam perkara nomor: 418/G/2022/PTUN.JKT agenda penyerahan barang bukti dari Penggugat (sidang kesembilan).
18. Menghadiri panggilan sidang PTUN Jakarta dalam perkara nomor: 418/G/2022/PTUN.JKT agenda mendengarkan keterangan saksi (sidang kesepuluh).
19. Verifikasi dokumen kependudukan di Kantor Kelurahan Kebon Baru dan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan terkait pembinaan pegawai di lingkungan Ombudsman RI.
20. Koordinasi dengan Kepala Kepolisian Sektor Setiabudi terkait dengan dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan di Polsek Metro Setiabudi. Laporan Polisi Nomor: LP/B/62/1/2023/SPKT/Sek.Budi/Res.Jaksel/PMJ tanggal 29 Januari 2023
21. Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik di lingkungan Ombudsman RI.
22. Pendampingan saksi Ketua Ombudsman RI dalam pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya terkait tindak pidana pemalsuan surat Ombudsman, Laporan Polisi Nomor: LP/B/4810/IX/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA.
23. Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik di lingkungan Ombudsman RI.
24. Koordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait tindak pidana pemalsuan surat Ombudsman, Laporan Polisi Nomor: LP/B/4810/IX/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA.
25. Menghadiri sidang kesebelas di PTUN Jakarta terkait Gugatan terhadap Ombudsman RI di PTUN Jakarta Perkara Nomor: 418/G/2022/PTUN.JKT dengan agenda penyampaian Tambahan Bukti Surat oleh Para Pihak dan mendengar keterangan Saksi dari Pihak Penggugat.
26. Kunjungan ke Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta dalam rangka

- permintaan keterangan personal data sehubungan dengan adanya pembinaan pegawai di lingkungan Ombudsman RI.
27. Perjalanan Dinas ke Manado sehubungan dengan adanya pembinaan pegawai di lingkungan Ombudsman RI dalam rangka pemeriksaan dan permintaan keterangan.
 28. Koordinasi ke Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (UNSURYA) dalam rangka pemeriksaan dokumen sehubungan dengan adanya pembinaan pegawai di lingkungan Ombudsman RI.
 29. Membuat Kesimpulan dalam Perkara Nomor: 418/G/2022/PTUN.JKT.
 30. Telaahan Staf tentang Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai Asisten Ombudsman RI.
 31. Menghadiri sidang keduabelas di PTUN Jakarta terkait Gugatan terhadap Ombudsman RI di PTUN Jakarta Perkara Nomor: 418/G/2022/PTUN.JKT dengan agenda penyampaian Kesimpulan oleh Para Pihak.
 32. Menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor: 418/G/2022/PTUN.JKT dengan agenda Pembacaan Putusan.
 33. Melaksanakan pemeriksaan terhadap Pengadu terkait dengan adanya pembinaan pegawai di lingkungan Ombudsman RI.
 34. Melaksanakan pemeriksaan terhadap Saksi terkait dengan adanya pembinaan pegawai di lingkungan Ombudsman RI.
 35. Melaksanakan pemeriksaan terhadap Saksi terkait dengan adanya pembinaan pegawai di lingkungan Ombudsman RI.
 36. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan 1 dan Laporan Hasil Pemeriksaan 2 tentang dugaan pelanggaran disiplin pegawai di lingkungan Ombudsman RI.
 37. Membuat surat jawaban atas Surat Kejaksaan Negeri Medan Nomor: SP.279/L.2.10/Fd.1/05/2023 Tanggal 05 Mei 2023 Perihal: Panggilan Saksi dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyerobotan Lahan Negara Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
 38. Melaksanakan pendampingan hukum yaitu mewakili Ketua Ombudsman RI selaku Terbanding dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor Perkara: 418/G/2022/PTUN.JKT.
 39. Membuat Kontra Memori Banding Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Perkara Nomor: 418/G/2022/PTUN.JKT.
 40. Mengirim surat permohonan verifikasi ijazah kepada Dirjen Dikti Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan adanya pembinaan pegawai di lingkungan Ombudsman RI.

41. Mengirim surat permohonan bantuan kehadiran paksa kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan panggilan kepada
42. Sekretaris Jenderal KPK sebagai Terlapor untuk dimintai keterangan dalam laporan dan pengaduan masyarakat kepada Ombudsman.
43. Melaksanakan koordinasi di Polda Metro Jaya mengenai bantuan kehadiran paksa terhadap Sekretaris Jenderal KPK sebagai Terlapor dalam laporan dan pengaduan masyarakat di Ombudsman.
44. Membuat Telaahan Staf tentang Penggunaan Lambang Negara.
45. Membuat Telaahan Staf tentang Pemberian Tanda Kehormatan Satyalencana Wira Karya.
46. Melaksanakan konfirmasi ke Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tindak lanjut dari surat Ombudsman Nomor: R/1033/PW.01.05/V/2023 Tanggal 25 Mei 2023 Hal: Permohonan Verifikasi Ijazah terkait dengan adanya pembinaan pegawai di lingkungan Ombudsman RI.
47. Melaksanakan koordinasi dengan Irwasum Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) mengenai teknis kehadiran paksa terhadap Sekretaris Jenderal KPK sebagai Terlapor dalam laporan dan pengaduan masyarakat di Ombudsman.
48. Mengadvokasi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor 347/G/2023/PTUN.JKT, dengan penyampaian surat jawaban atas Surat Panggilan Sidang Nomor: W2.TUN1-2653/HK.06/X/2023 Tanggal 04 Oktober 2023.
49. Mengadvokasi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT:
 - a. 19 Oktober 2023: Registrasi Surat Kuasa Ketua Ombudsman Nomor: B/38/HK.07.03/X/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
 - b. 14 November 2023: Penyampaian Jawaban Tergugat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: R/44/HK.03/XI/2023.
 - c. 29 November 2023: Penyampaian Duplik Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: R/46/HK.03/XI/2023.
 - d. 06 Desember 2023: Penyampaian Bukti Surat Tergugat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Perkara Nomor: 517/G/2023/PTUN.JKT Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: R/2596/HK.03/XII/2023.

- e. 20 Desember 2023: Menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan agenda tambahan bukti surat Para Pihak.
50. Mengadvokasi gugatan di Pengadilan Negeri Sengeti Perkara dalam perkara perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Snt:
- a. 25 Oktober 2023: Draf surat jawaban Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor: 53/Pdt.G/2023/PN Snt Tanggal 23 Oktober 2023.
 - b. 10 November 2023: Draf surat jawaban Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor: 53/Pdt.G/2023/PN Snt Tanggal 06 November 2023.
51. Mengadvokasi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor 525/G/TF/2023/PTUN.JKT dengan membuat draf surat jawaban atas Surat Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: W2.TUN1-2803/HK.06/X/2023 Tanggal 19 Oktober 2023.
52. Mengadvokasi gugatan di Pengadilan Negeri Klas I A Pekanbaru dalam perkara Nomor: 249/Pdt.G/2023/PN.Pbr, dengan membuat draf surat jawaban Relas Panggilan Pengadilan Negeri Klas I A Nomor: 249/Pdt.G/2023/PN.Pbr Tanggal 30 Oktober 2023.
53. Mengadvokasi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor 538/G/2023/PTUN.JKT, dengan penyampaian surat jawaban atas Surat Panggilan Sidang Nomor: W2.TUN1-2918/HK.06/XI/2023 Tanggal 01 November 2023.
54. Mengadvokasi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Semarang dalam perkara perdata Nomor 82/G/TF/2023/PTUN.SMG:
- a. 16 November 2023: Draf surat jawaban atas panggilan pemeriksaan persiapan Nomor 82/G/TF/2023/PTUN.SMG Tanggal 14 November 2023.
 - b. 07 Desember 2023: Melaksanakan monitoring perkembangan kasus di Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah.
55. Mengadvokasi sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Banten Register Nomor 069/VII/KI/KI BANTERN-PS/2023:
- a. 28 November 2023 : Menghadiri sidang agenda pembuktian bukti-bukti di Komisi Informasi Provinsi Banten.
 - b. 15 Desember 2023 : Melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Banten terkait dengan sengketa di Komisi Informasi Provinsi Banten.
56. Mengadvokasi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor: 418/G/2022/PTUN.JKT:
- a. 18 Desember 2023 : Registrasi Surat Kuasa Ketua Ombudsman Nomor: R/56/HK.07.03/XII/2023.

- b. 18 Desember 2023 : Penyampaian Kontra Memori Kasasi Nomor: R/57/HK.07.03/XII/2023.
- 57. Membuat Telaahan Staf tentang Aduan Amalia terhadap Surat Inspektorat Ombudsman Nomor: R/1443/PW.04.02/VII/2023.
- 58. Membuat Telaahan Staf tentang Panggilan Sidang Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 236/XI/KIPBANTEN-RLS/2023.
- 59. Membuat Telaahan Staf tentang Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah Ditetapkan sebagai Tersangka.

Capaian Tim Kerja Advokasi Hukum dan Ajudikasi pada Tahun 2023

- a. Terselesaikan advokasi hukum atas Gugatan terhadap Ombudsman RI di PTUN Jakarta dalam Perkara Nomor: 418/G/2022/PTUN.JKT
- b. Terselesaikan advokasi hukum atas Gugatan terhadap Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh di PTUN Banda Aceh dalam Perkara Nomor: 37/G/TF/2022/PTUN.BNA
- c. Advokasi hukum atas tindak pidana yang dilaporkan di Kepolisian terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat Ombudsman RI Laporan Polisi Nomor: LP/B/4810/IX/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA
- d. Advokasi hukum terkait dengan dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan di Kepolisian, Laporan Polisi Nomor: LP/B/62/II/2023/SPKT/Sek.Budi/Res.Jaksel/PMJ
- e. Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran etik di lingkungan Ombudsman RI.

b) Jumlah telaah/ kajian hukum yang berjumlah 3 (Tiga) dokumen, yaitu:

- 1) Telaahan Staf Terhadap Pengadu an. Moh Tohirin mempermasalahkan penutupanaduan dengan nomor registrasi WBS2.0-2302-00121 an. Moh. Tohirin
- 2) Telaahan Staf Terhadap Penjabat Gubernur Bangka Belitung.
- 3) Telaahan Staf tentang Pelaksanaan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Ombudsman terhadap Kepala Perwakilan Ombudsman yang telah Habis Masa.

3) Tim Kerja Dokumentasi dan Diseminasi;

Pada Tahun 2023 Tim Kerja Dokumentasi dan Diseminasi telah melaksanakan;

- 1) Menyusun dan Legalisasi Salinan Rekomendasi.
- 2) Pembentukan Tim Pengelola JDIH Ombudsman Tahun 2023.
- 3) Diseminasi Peraturan Ombudsman.
- 4) Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2022 dan Rencana Pengembangan JDIH Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023.

- 5) Rapat Tindak Lanjut Hasil Evaluasi JDIH 2022 dan Rencana Pengembangan JDIH2023.
- 6) Penarikan Data JDIH untuk Kearsipan.
- 7) Launching Media Sosial Instagram JDIH Ombudsman.
- 8) Rapat Koordinasi dengan Vendor Terpilih terkait Pengembangan JDIH Ombudsman berbasis Android.
- 9) Benchmarking JDIH Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
- 10) Input Produk Hukum ke JDIH 28 (Dua Puluh Delapan) Dokumen.
- 11) Penerjemahan Peraturan Ombudsman kedalam Bahasa Inggris.

Capaian Tim Kerja Dokumentasi dan Diseminasi sampai dengan Desember tahun 2023

No	Tanggal	Kegiatan Yang Dilaksanakan	Keterangan
1.	12 Januari 2023	<p>Menyusun dan Legalisasi Salinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Nomor 0002/RM.03.01/0750.2015/XII/2022 tentang Maladministrasi Atas Belum Diberikannya Informasi Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Berupa Dokumen Hak Guna Usaha (HGU) Kepada Forest Watch Indonesia Walaupun Telah Terdapat Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap 2. Rekomendasi Nomor: 0003/RM.03.01/XII/2022 tentang Maladministrasi Oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam Penyelesaian Pemberian Kompensasi Kerugian Atas Kerusakan 5 (Lima) Unit Ruko Milik Warga Akibat Dampak Dari Ambruknya Dermaga Sambas Tahun 2014 	

2.	02 Februari 2023	Diseminasi: 1. Peraturan Ombudsman Nomor 54 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia	Diadakan via daring
----	------------------	---	---------------------

No	Tanggal	Kegiatan Yang Dilaksanakan	Keterangan
		2. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Kerja Sama Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia	
3.	10 Februari 2023	Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2022 dan Rencana Pengembangan JDIH Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023	Mengundang Peserta Eksternal dari Pusat JDIHN
4.	20 Februari 2023	Rapat Tindak Lanjut Hasil Evaluasi JDIH 2022 dan Rencana Pengembangan JDIH 2023	Tim Pengelola JDIH Ombudsman
5.	23 Februari 2023	Penarikan Data JDIH untuk Kearsipan	
6.	27 Februari 2023	Launching Media Sosial Instagram JDIH Ombudsman	https://www.instagram.com/jdihoombudsmanri/
7.	08 Maret 2023	Rapat Koordinasi dengan Vendor Terpilih terkait Pengembangan JDIH Ombudsman berbasis Android	
8.	30 Maret 2023	Benchmarking JDIH Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	
9.	03 April 2023	Rapat rencana pembuatan aplikasi JDIH berbasis Android	
10.	05 April 2023	Pengajuan Surat permohonan penerjemahan PO ke dalam Bahasa Inggris	
11.	14 April 2023	1. Rapat Tim JDIH Ombudsman dan koordinasi awal dengan vendor terkait android	

No	Tanggal	Kegiatan Yang Dilaksanakan	Keterangan
		2. Kunjungan ke Dirjen PPU Kemenkumham terkait penyampaian dan koordinasi pembuatan Penerjemahan PO	
12.	03 Mei 2023	Rapat Tim JDIH Ombudsman	
13.	05 Mei 2023	Rapat Finalisasi Pengembangan Aplikasi JDIH	
14.	08 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Salinan Produk Hukum: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia; dan 2. Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1 Tahun 2022 tentang Buku Saku Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia. <p>Perencanaan rapat penerjemahan</p>	
15.	09 Mei 2023	Rapat Pembahasan Terjemahan Resmi Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 ke dalam Bahasa Inggris dengan Tim Penerjemah Kemenkumham.	

No	Tanggal	Kegiatan Yang Dilaksanakan	Keterangan
16.	13 Mei 2023	Nota Dinas Pengadaan Rak buku dan akrilik untuk pojok baca JDIH	
17.	19 Mei 2023	Rapat Lanjutan Pembahasan Terjemahan Resmi Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 ke dalam Bahasa Inggris dengan Tim Penerjemah Kemenkumham	
18.	25 Mei 2023	Finalisasi Penerjemahan Resmi Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 ke dalam Bahasa Inggris dengan internal	
19.	1 Juni 2023	Upload konten IG ucapan Hari Lahir Pancasila 2023	
20.	4 Juni 2023	Upload konten IG ucapan selamat Hari Raya Waisak	
21.	9 Juni 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan KAK dan RAB kegiatan Launcing Aplikasi JDIH dan Webinar Optimalisasi peran JDIH ORI 2. Upload konten IG kunjungan kerja ke Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI terkait <i>Benchmarking</i> Kebijakan Satu Data. 3. Upload konten IG Rapat Internal terkait Penerjemahan Peraturan Ombudsman (PO) Nomor 26 Tahun 2017 bersama Anggota Ombudsman RI, Bapak Johannes Widijantoro dan Keasistenan Utama. 	
22.	13 Juni 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upload Konten IG Diskusi Kerja Pembahasan Rancangan Peraturan Ombudsman tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan. 2. Upload Konten IG kunjungan Universitas Brawijaya ke Ombudsman RI membahas terkait tindak lanjut. 	

No	Tanggal	Kegiatan Yang Dilaksanakan	Keterangan
		rencana pendirian Ombudsman RI Corner.	1.
23.	14 Juni 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Lanjutan Pembahasan Terjemahan Resmi Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 ke dalam Bahasa Inggris. 2. Rapat Pembahasan Terjemahan Resmi Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 ke dalam Bahasa Inggris dengan Tim Penerjemah Kemenkumham 	2.
24.	15 Juni 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Tim JDIH Ombudsman terkait Pojok Baca JDIH dengan PRT 2. Permohonan Narasumber kegiatan perbaikan dan penyempurnaan aplikasi JDIH. 3. Pengajuan Nota Dinas Revisi Anggaran Layanan Hukum 	3.
25.	16 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan Narasumber Kegiatan JDIH tgl 22 Juni 2023: <ol style="list-style-type: none"> 1. Narasumber BPHN 2. Narasumber BPK 3. Narasumber KIP • Nota Dinas Permohonan Fasilitasi Kegiatan Launcing Aplikasi JDIH dan Webinar Optimalisasi Peran JDIH 	4.
26.	19 Juni 2023	Rapat Persiapan Acara Webinar dan Launching Aplikasi JDIH Ombudsman RI	5.
27.	20 Juni 2023	Upload Konten IG Pembahasan Penerjemahan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Tata Cara	6.

No	Tanggal	Kegiatan Yang Dilaksanakan	Keterangan
		Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan ke dalam Bahasa Inggris di Hotel Harper Jakarta, 14 Juni 2023.	
28.	21 Juni 2023	Upload konten IG ucapan selamat ulang tahun Presiden Joko Widodo	
29.	22 Juni 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Webinar dan Launching Aplikasi JDIH Ombudsman RI. 2. Upload konten IG ucapan selamat ulang tahun Jakarta ke 496 	
30.	23 Juni 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Narasumber Kegiatan tanggal 22 Juni 2023 2. SK Panitia Kegiatan 3. Sertifikat Kegiatan 4. Administrasi Kegiatan. 5. Upload konten kegiatan launching di IG JDIH 	
31.	26 Juni 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upload Konten IG terkait Akses Aplikasi JDIH Android. 2. Upload Konten IG terkait rapat koordinasi persiapan tauval SPBE 2023 dan review arsitektur SPBE Ombudsman RI, dengan mengundang Narasumber dari Kemenkominfo dan KemenpanRB 	
32.	27 Juni 2023	Upload Konten Keg. Pemusnahan Arsip Ombudsman RI di IG JDIH	
33.	28 Juni 2023	Upload konten ucapan hari raya di IG JDIH	
34.	07 Juli 2023	Melakukan Survei Kepuasan Layanan Hukum Semester 1 tahun 2023	
35.	14 Juli 2023	Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 244 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tim Pengelola dan	

No	Tanggal	Kegiatan Yang Dilaksanakan	Keterangan
		Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023	
36.	18 Juli 2023	Rapat Rutin Tim JDIH Ombudsman terkait Kompetisi Konten Edukasi Hukum <i>Legal Development Content Creator</i> (LDCC) Awards Tahun 2023	
37.	25 Juli 2023	Rapat Rutin Tim JDIH Ombudsman terkait Kompetisi Konten Edukasi Hukum <i>Legal Development Content Creator</i> (LDCC) Awards Tahun 2023	
38.	10 Agustus 2023	Diseminasi Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 238 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian dan Pemberian Insentif Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia	
39.	14 Agustus 2023	Pembuatan Salinan, Penjilidan dan Penggandaan Rekomendasi NOMOR: 001/RM.03.01/VIII/2023	
40.	21 Agustus 2023	<i>Upload</i> Video Kompetisi Konten Edukasi Hukum <i>Legal Development Content Creator</i> (LDCC) Awards Tahun 2023	
41.	04 September 2023	Diseminasi Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 308 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia	
42.	06 September 2023	Rapat Tim JDIH Ombudsman terkait persiapan <i>Benchmarking</i> bersama Tim JDIH Sekretariat Jenderal DPD RI	
43.	14 September 2023	<i>Benchmarking</i> bersama Tim JDIH Sekretariat Jenderal DPD RI	

No	Tanggal	Kegiatan Yang Dilaksanakan	Keterangan
44.	18 September 2023	<p>Penetapan Penerjemahan Resmi dalam Bahasa Inggris oleh Kementerian Hukum dan HAM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Ombudsman Nomor 26 tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan; dan <p>Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan.</p>	
45.	25 September 2023	Pembuatan Salinan, Penjilidan dan Penggandaan Rekomendasi NOMOR: 002/RM.03.01/IX/2023	
46.	25 September 2023	Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 323 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023	
47.		<p>Input Produk Hukum ke JDIH :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang = 9 dokumen 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang = 1 dokumen 3. Peraturan Presiden = 3 dokumen 4. Peraturan Pemerintah = 1 dokumen 5. Keputusan Presiden = 4 dokumen 6. Peraturan Kementerian= 13 dokumen 7. Keputusan Kementerian = 5 dokumen 8. Keputusan Bersama Menteri = 9 dokumen 	88 dokumen

No	Tanggal	Kegiatan Yang Dilaksanakan	Keterangan
		9. Rekomendasi Ombudsman = 2 dokumen 10. Surat Edaran Ketua Ombudsman = 8 dokumen 11. Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman = 2 12. Rekomendasi Ombudsman = 2 13. MoU = 31 dokumen	
48.		Penerjemahan Peraturan Ombudsman: 1. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan. 2. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 3. Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan. 4. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.	Bahasa Inggris

Data JDIIH Ombudsman

1. Tim Pengelola JDIIH Ombudsman Tahun 2023

a. Eksternal

No.	Nama	Jabatan
1.	Nofli, Bc.I.P., S.Sos., S.H., M.Si.	Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Infomasi Hukum Nasional

b. Internal Ombudsman RI

NO	NAMA	JABATAN
1.	Yuni Susita Dewi	Plt. Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan
2.	Desy Jayanthi Pratika	Analisis Kebijakan Ahli Muda
3.	Cahaya Rahmadhani	Analisis Peraturan Perundang-Undangan
4.	Teuku Ryan Herdiansyah	Analisis Peraturan Perundang-Undangan
5.	Panji Jaya Laksana	Analisis Hukum
6.	Nurul Istiamuji	Analisis Humas
7.	Firman Yudi Putra	Pranata Komputer Ahli Muda
8.	Ganjar Yoga Pratama	Analisis Sistem Informasi
9.	Zenia Annabel	Pengawas Perpustakaan
10.	Imastuti Daraayu Nurfidyawati	Pengelola Pengkajian dan Penelaahan Hukum
11.	Kadek Bayu Krisna Tenggara	Pengolah Data Informasi dan Hukum
12.	Almah Ristanti	Pengolah Data Informasi dan Hukum
13.	Dwi Hartanto	Pengolah Data Informasi dan Hukum
14.	Hasti Aulia Nida	Jurnalis

2. Berdasarkan data dari Google analytic selama rentang waktu triwulan IV tahun 2023 didapat informasi sebagai berikut:

a. Jumlah pengunjung baru sebanyak 1.191.



- b. Dari hasil pemindahan server JDIH Ombudsman dari sebelumnya server on-permise ke server Pusat Data Nasional (PDN) yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal tersebut menjadikan IP JDIH Ombudsman berubah dari yang sebelumnya 172.16.1.27 menjadi 10.88.0.105 terdapat beberapa kendala pada saat upload dokumen diantaranya file yang tidak sesuai dan dokumen yang tidak terbaca oleh sistem sehingga diperlukan pembaharuan.



- c. Melengkapi dan memperbaharui pelaporan data keanggotaan JDIH dalam sistem e-report.jdihn.go.id diantaranya pembaharuan SDM disesuaikan berdasarkan surat Keputusan, pelatihan serta anggaran koleksi dokumen hukum juga disesuaikan berdasarkan hasil terakhir upload serta pembaharuan beberapa hasil capaian.



Upload Media Sosial JDIH Ombudsman RI

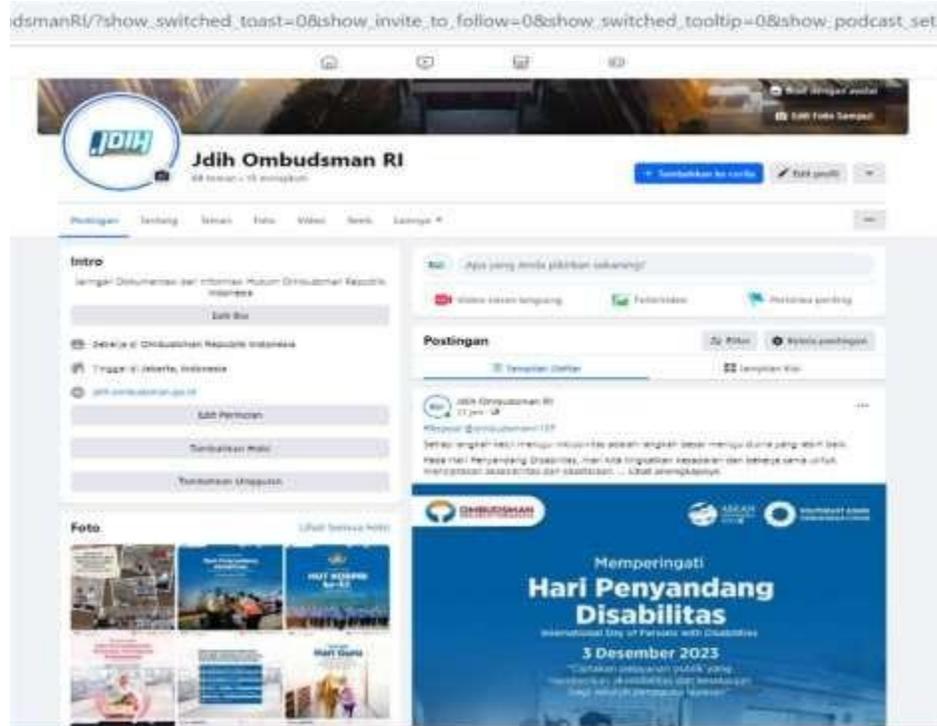
1. Instagram

Jumlah postingan sebanyak 86 dan jumlah Pengikut dengan total 141 pengikut



2. Facebook

Jumlah postingan Facebook sebanyak 86 dengan jumlah 68 pertemanan pengikut.



- d. Mengikuti kegiatan Pertemuan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 2023 dan LDCC Award.





e. Mengikuti Kegiatan konferensi hukum nasional yang diselenggarakan BPHN



f. Evaluasi Metadata dokumen hukum

lampiran_judul	lampiran_dokumen	lampiran_abstrak	teekait	status_id	catatan	ats_desc	keyword	jumlah	t_user
2023skbmenteri01	exp-2023skbmenteri004.pdf			150			0 4,2023,cuti,SKB	83	dara
2023skketua308	exp-2023skketua308.pdf	exp-5K308Tahun20		150			0 SK,2023,pengetahu	110	cahya
Rekomendasi Gan	exp-Rekomendasi_Ganti_Rugi_1.hok			150			0 REKOMENDASI,20	83	bayu
2023pp079	exp-.pdf			150			0 pp,2021,79,ASN,ac	82	almah
2023skketua239	exp-2023skketua239.pdf		778	150			153 239,DIP,2023	147	dara
2023skketua284	exp-2023skketua284.pdf			150			153 SK,DIK,2023,284	226	dara
Permenkumham,	exp-Permenkumham_17_2023.pdf		775,776	150			153 peraturan,perancar	111	cahya
Permenkumham,	exp-Permenkumham_5_2020.pdf		775	151			152 5,2020,peraturan,p	88	cahya
Permenkumham,	exp-Permenkumham_23_2021.pdf			150			0 23,peraturan,perm	43	cahya
2023mou037	exp-2023mou037.pdf			150			0	54	dara
2023mou036	exp-2023mou036.pdf			150			0	69	dara
2023mou035	exp-2023mou035.pdf			150			0	43	dara
2023mou034	exp-2023mou034.pdf			150			0	74	dara
2023mou032	exp-2023mou032.pdf			150			0	43	dara
2023mou031	exp-2023mou031.pdf			150			0	36	dara
2023mou030	exp-2023mou030.pdf			150			0	37	dara
2023mou024	exp-2023mou024.pdf			150			0	29	dara
2023mou023	exp-2023mou023.pdf			150			0	32	dara
2023mou022	exp-2023mou022.pdf			150			0	28	dara
2023mou021	exp-2023mou021.pdf			150			0	31	dara
2023mou020	exp-2023mou020.pdf			150			0	32	dara

lampiran_dokumen	lampiran_abstrak	terkait	status_id	catatan	sts_desc	keyword	jml	user
exp-PC321112005.pdf	(file)		150			0 2008.37,Ombudm	12	bayu
exp-.pdf	(file)		150			0 20,ASN,Lindang-ur	29	Indra
exp-RekORI2023001.pdf	(file)		150			0 REKOMENDASLO	17	bayu
exp-.pdf	(file)	727	150	Kabinet 2		0 PC,2023,satudata!	111	desy
exp-.pdf	(file)		150			0 HASIL_penilaianjdi	81	desy
exp-2023skketua199.pdf	(file)	560	150		155 SK,SPBE,2023,199		40	dara
exp-2023perseljen003.pdf	(file)		150		0 perseljen,PEDOM		95	dara
exp-2023rek002.pdf	(file)		150		0 2,REKOMENDASL2		53	dara
exp-2023mou050.pdf	(file)		150		0 50,MoU,2023		33	dara
exp-2023mou048.pdf	(file)		150		0 48,MoU,2023		43	dara
exp-2023mou047.pdf	(file)		150		0 47,MoU,2023		21	dara
exp-2023mou046.pdf	(file)		150		0 46,MoU,2023		53	dara
exp-2023mou045.pdf	(file)		150		0 45,MoU,2023		23	dara
exp-2023mou043.pdf	(file)		150		0 43,MoU,2023		30	dara
exp-2023mou042.pdf	(file)		150		0 42,MoU,2023		41	dara
exp-2023mou040.pdf	(file)		150		0 41,MoU,2023		29	dara
exp-2023mou040.pdf	(file)		150		0 40,MoU,2023		24	dara
exp-2023mou039.pdf	(file)		150		0 39,MoU,2023		11	dara
exp-2023mou038.pdf	(file)		150		0 38,MoU,2023		41	dara
exp-2023skketua323.pdf	(file)	287,298,7	150		155 SK,323,2023,jdi		50	dara
exp-2023skketua244.pdf	(file)	287,298,7	150		155 SK,2023,jdi,244		28	dara

https://jdh.ombudman.go.id/be/peraturan/getData/105

tanggal 10/11/2023

Penandatangan

Pemrakasa

Sumber

Urusan Pemerintahan 160 BIDANG TENAGA KERJA

Lokasi

Bahasa ID INDONESIA Bidang Hukum 41 HUKUM UMUM

Status 150 BERKALA Keterangan

Catatan

Judul Lampiran Judul Lampiran

Produk Hukum Terkait Produk Hukum Timas

Keyword 134.20 308.ASN 516.Umang-umang 628.2023

g. Melakukan sinkronisasi Berkala oleh Kelompok Teknologi Informasi

https://jdh.go.id/user/dashboard

LOG SINKRON ANGGOTA

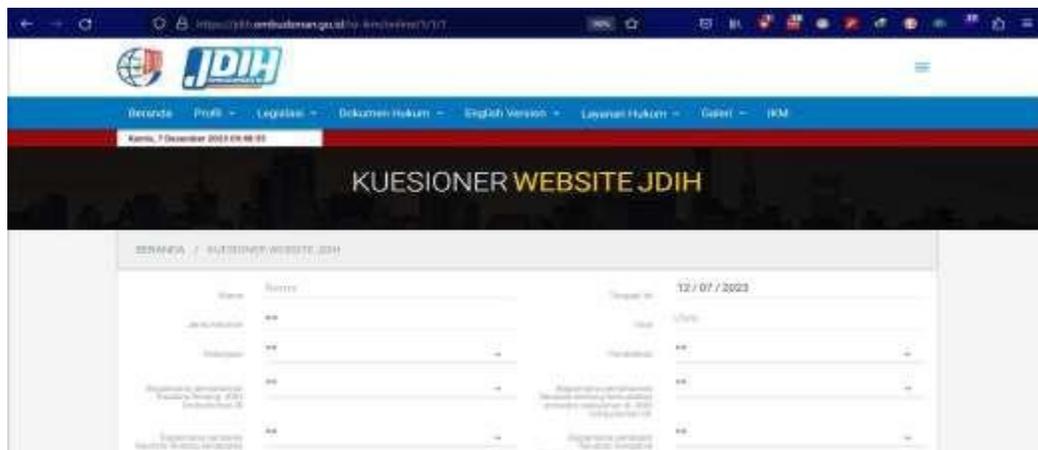
Show: 10 entries Search:

Nomor	Tanggal	Sync	Data	API	Keterangan
1	November 16, 2023 1:38 AM	Sukses Sync	701	https://jdh.ombudman.go.id/integrasi/sampel_API?token=abc	Sukses dengan 701 data.
2	November 13, 2023 1:45 PM	Gagal Sync	0	https://jdh.ombudman.go.id/integrasi/sampel_API?token=abc	
3	October 2, 2023 3:25 PM	Sukses Sync	477	https://jdh.ombudman.go.id/integrasi/sampel_API?token=abc	Sukses dengan 477 data.
4	September 29, 2023 9:14 PM	Sukses Sync	694	https://jdh.ombudman.go.id/integrasi/sampel_API?token=abc	Sukses dengan 694 data.
5	September 29, 2023 9:06 PM	Sukses Sync	694	https://jdh.ombudman.go.id/integrasi/sampel_API?token=abc	Sukses dengan 694 data.
6	September 29, 2023 9:25 PM	Sukses Sync	694	https://jdh.ombudman.go.id/integrasi/sampel_API?token=abc	Sukses dengan 694 data.

h. Perbaikan Metadata pada Database JDIH Ombudsman

lampiran_judul	lampiran_dokumen	lampiran_abstrak	terkait	status_id	catatan	sts_desc	keyword	jumlah	L_user
2023skbmenter00	exp-2023skbmenter004.pdf			150			0 4,2023.cuti.SKB	83	dara
2023skketua308	exp-2023skketua308.pdf	exp-5K100Tahun21		150			0 SK,2023.Pengetaha	110	cahya
Rekomendasi Gan	exp-frekomendasi_Ganti_Rugi_1thok			150			0 REKOMENDASI.20	83	bayu
2023pp079	exp-pdf			150			0 pp,2021,79.ASN.La	82	almah
2023skketua239	exp-2023skketua239.pdf		778	150			153 239.DPP,2023	147	dara
2023skketua284	exp-2023skketua284.pdf			150			153 SK,DKK,2023,284	226	dara
Permenkumham	exp-Permenkumham_17_2023.pdf		775,776	150			153 peraturan.peranc	111	cahya
Permenkumham	exp-Permenkumham_5_2020.pdf		775	151			152 5,2020,peraturan,p	88	cahya
Permenkumham	exp-Permenkumham_23_2021.pdf			150			0 23,peraturan.perm	43	cahya
2023mou037	exp-2023mou037.pdf			150			0	54	dara
2023mou036	exp-2023mou036.pdf			150			0	69	dara
2023mou035	exp-2023mou035.pdf			150			0	43	dara
2023mou034	exp-2023mou034.pdf			150			0	74	dara
2023mou032	exp-2023mou032.pdf			150			0	43	dara
2023mou031	exp-2023mou031.pdf			150			0	36	dara
2023mou030	exp-2023mou030.pdf			150			0	37	dara
2023mou024	exp-2023mou024.pdf			150			0	29	dara
2023mou023	exp-2023mou023.pdf			150			0	32	dara
2023mou022	exp-2023mou022.pdf			150			0	28	dara
2023mou021	exp-2023mou021.pdf			150			0	31	dara
2023mou020	exp-2023mou020.pdf			150			0	32	dara

i. Perbaikan Halaman Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada aplikasi JDIH Ombudsman



j. Pemutakhiran data pada aplikasi JDIH Ombudsman

No.	Jenis Peraturan	Jumlah
1.	Undang-Undang	46
2.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	4
3.	Peraturan Pemerintah	27
4.	Peraturan Presiden	27
5.	Keputusan Presiden	7
6.	Intruksi Presiden	3
7.	Peraturan Kementerian	70

No.	Jenis Peraturan	Jumlah
8.	Peraturan Ombudsman	56
9.	Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian	2
10.	Keputusan Kementerian/Lembaga	112
11.	Peraturan Eselon 1 Kementerian/Lembaga	34
12.	Keputusan Eselon 1 Kementerian/Lembaga	16
13.	Surat Edaran	9
14.	Rekomendasi Ombudsman	66
15.	Memorandum Of Understanding	194
16.	Perjanjian Kerja Sama	23
17.	Monografi Hukum	47
18.	Artikel Hukum	24
19.	Putusan	6
20.	Berita	79
Total		853

b. Tim Kerja Sama

Tim Kerja Kerja Sama yang terdiri dari Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri dan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri, sampai dengan akhir tahun 2023, Tim Kerja Kerja Sama telah melaksanakan:

1) Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri terbagi menjadi dua kelompok yaitu Fasilitasi Kerja Sama Pusat dan Fasilitasi Kerja Sama Perwakilan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Fasilitasi Kerja Sama Pusat, dan Perwakilan terdiri dari 34 (tiga puluh empat) kegiatan:
- 1) Kerja Sama Ombudsman Republik Indonesia dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
 - 2) Kerja Sama Ombudsman Republik Indonesia dengan Universitas Bina Darma.
 - 3) Kerja Sama Ombudsman Republik Indonesia dengan Universitas MuhammadiyahPalembang.
 - 4) Kerja Sama Ombudsman Republik Indonesia dengan beberapa Perguruan Tinggi di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
 - 5) Kerja Sama Ombudsman Republik Indonesia dengan Universitas MuhammadiyahRiau.
 - 6) Kerja Sama Ombudsman Republik Indonesia dengan Kementerian PerhubunganRepublik Indonesia.

- 7) Kerja Sama Ombudsman Republik Indonesia dengan Universitas Muria Kudus.
- 8) Komnas HAM, Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ombudsman RI, Komisi Nasional Disabilitas.
- 9) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- 10) Pemerintah Kota Ambon.
- 11) Pemerintah Kota Semarang.
- 12) Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
- 13) Universitas Kristen Satya Wacana.
- 14) Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- 15) Universitas Pasir Pengaraian
- 16) Kementerian ATR/BPN
- 17) Universitas Widyagama Malang
- 18) Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
- 19) Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
- 20) Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
- 21) Pemerintah Kabupaten Belitung
- 22) Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
- 23) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
- 24) Pemerintah Kota Tarakan
- 25) Pemerintah Kabupaten Malinau
- 26) Pemerintah Kabupaten Nunukan
- 27) Pemerintah Kabupaten Bulungan
- 28) Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
- 29) Kerja Sama Ombudsman Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Demak.
- 30) Kerja Sama Ombudsman RI dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
- 31) Kerja Sama Ombudsman Republik Indonesia dengan beberapa Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Riau.
- 32) Kerja Sama Ombudsman Republik Indonesia dengan beberapa Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 33) Kerja Sama Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- 34) Kerja Sama Ombudsman Republik Indonesia dengan beberapa Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Di Triwulan IV Tahun 2023 Fasilitasi Kerja Sama dalam Negeri melakukan kegiatan, antara lain;

- a) Fasilitasi Kerja Sama Pusat dan Perwakilan:

No.	Mitra	Tanggal Penandatanganan	
Nota Kesepahaman/Kesepakatan			
1	Otoritas Jasa Keuangan	10 Oktober 2023	
2	Komisi Informasi Pusat	16 Oktober 2023	
3	Universitas Batam	14 November 2023	
4	Pemerintah Kota Tual	14 November 2023	
5	Universitas Siliwangi	14 November 2023	
6	Universitas Mataram	17 November 2023	
7	Universitas Hamzanwadi	17 November 2023	
8	Pemerintah Kabupaten Pelalawan	23 November 2023	
9	Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	23 November 2023	
10	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	23 November 2023	
11	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	23 November 2023	
12	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	23 November 2023	
13	UIN Datokarama Palu	3 Desember 2023	
14	Universitas Indonesia	5 Desember 2023	
15	Universitas Lambung Mangkurat	5 Desember 2023	
16	UIN Antasari Banjarmasin	5 Desember 2023	
17	UKI Ruteng	6 Desember 2023	
18	Pemerintah Kota Bontang	12 Desember 2023	
19	Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	12 Desember 2023	
20	Universitas Negeri Medan	12 Desember 2023	
Perjanjian Kerja Sama			
1	Otoritas Jasa Keuangan	9 Oktober 2023	
2	Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	16 November 2023	
3	Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional	20 November 2023	
4	Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan RI	7 Desember 2023	
5	Direktorat Jenderal Pajak	11 Desember 2023	
No.	Tanggal Pelaksanaan	Kegiatan	Peserta
1	3 Oktober 2023	Pembahasan Rencana Perpanjangan Kesepahaman Bersama antara Ombudsman RI dan Perpustakaan Nasional RI	1. Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas Perpusnas RI; 2. Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi Ombudsman RI; 3. Tim Kerja Sama; 4. Tim Perpustakaan.
2	9 Oktober 2023	Koordinasi rencana kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam rangka pelaksanaan Program Pelatihan Dasar dan Bela Negara Asisten Ombudsman RI	1. Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi; 2. Analis Kebijakan Ahli Utama; 3. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum; 4. Keasistenan Utama II; Dan

			5. Tim Kerja Sama.
3	10 Oktober 2023	Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ombudsman RI dan Otoritas Jasa Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Ombudsman RI; 2. Anggota Ombudsman RI (Bp. Yeka Hendra Fatika) 3. Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi; 4. Tim Hubungan Masyarakat; 5. Tim Kerja Sama; 6. Bag. Protokol.
4	10 Oktober 2023	Pembahasan Tindak Lanjut Kerja Sama antara Ombudsman RI dan Politeknik STIA LAN Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum; 2. Tim Kerja Sama.
5	11 Oktober 2023	Pembahasan Nota Kesepakatan antara Ombudsman RI dan Pemerintah Kabupaten Sambas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bag. Hukum Kabupaten Sambas; 2. Bag. Kerja Sama Kabupaten Sambas; 3. Tim Hukum; 4. Tim Kerja Sama.
6	11 Oktober 2023	Kunjungan, Audiensi dan Implementasi Kerja Sama dari Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Ombudsman RI; 2. Tim Kerja Sama; dan 3. Bagian Protokol.
7	11 Oktober 2023	Pembahasan Konsep Perjanjian Kerja Sama antara Inspektorat Jenderal dengan Ombudsman Republik Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2. Bagian Hukum Kementerian Perhubungan 3. Bagian kerja Sama Kementerian Perhubungan 4. Tim Hukum Ombudsman RI 5. Tim Kerja Sama Ombudsman RI
8	12 Oktober 2023	Pembahasan Nota Kesepahaman antara Ombudsman RI dan Komisi Informasi Pusat RI	<ol style="list-style-type: none"> 6. Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi; 7. Tim Kerja Hubungan Masyarakat; 8. Tim Kerja Teknologi Informasi; 9. Tim Hukum, dan 10. Tim Kerja Sama.
9	12 Oktober 2023	Pembahasan Nota Kesepahaman antara Ombudsman RI dan Komisi Informasi Pusat RI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keasistenan Utama I 2. Tim Kerja Hubungan Masyarakat

			<ul style="list-style-type: none"> 3. Tim Kerja Teknologi Informasi 4. Tim Hukum 5. Tim Kerja Sama
10	13 Oktober 2023	Pembahasan Perjanjian Kerja Sama antara Ombudsman Republik Indonesia dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> 1. Analis Kebijakan Ahli Utama; 2. Keasistenan Utama I; 3. Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat; 4. Keasistenan Utama Resolusi Monitoring; 5. Tim Hukum; dan 6. Tim Kerja Sama.
11	20 Oktober 2023	Rapat Koordinasi Pengawasan Pelayanan Publik di Sektor Pertanian dan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tim Kerja Sama
12	23 Oktober 2023	Rapat Finalisasi Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ombudsman RI dan Direktorat Jenderal Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keasistenan Utama III 2. Tim Kerja Sama 3. Tim Hukum
13	24 Oktober 2023	Pembahasan Perjanjian Kerja Sama antara Ombudsman Republik Indonesia dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> 1. Analis Kebijakan Ahli Utama; 2. Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat; 3. Kesistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi; 4. Keasistenan Utama Manajemen Mutu; 5. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring; 6. Keasistenan Utama I; 7. Keasistenan Utama II; 8. Keasistenan Utama III; 9. Keasistenan Utama IV; 10. Keasistenan Utama V; 11. Keasistenan Utama VI; 12. Keasistenan Utama VII; 13. Tim Hukum; dan 14. Tim Kerja Sama.
14	25 Oktober 2023	Tindak Lanjut Rencana Kerja Sama antara Ombudsman RI dan PT. Pos Indonesia (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bagian Perlengkapan Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan; 2. Kelompok Tata Persuratan dan Kearsipan; 3. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa; 4. Tim Kerja Sama.
15	26 Oktober 2023	Pembahasan rencana kerja sama antara Ombudsman RI, Komisi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komisioner Komisi Nasional Disabilitas

		Informasi Pusat dan Komisi Disabilitas Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 2. Plt. Sekretaris Komis Informasi Pusat 3. Anggota Ombudsman RI (Bapak Indraza Marzuk Rais) 4. Kepala Biro Hukum Kerja Sama, dan Organisasi 5. Keasistenan Utama I 6. Keasistenan Utama VII 7. Tim Kerja Hubungan Masyarakat 8. Tim Kerja Sama
16	26 Oktober 2023	Penyusunan Draf Perjanjian Kerja Sama antara Ombudsman RI dan BPJS Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 9. Tim Kesejahteraan dan Pensiun; 10. Tim Kerja Sama.
17	27 Oktober 2023	Pembahasan Nota Kesepahaman antara Ombudsman RI dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Biro Hukum Kerja Sama, dan Organisasi; 2. Analis Kebijakan Ahli Utama; 3. Keasistenan Utama I; 4. Keasistenan Utama II; 5. Tim Kerja Sama.
18	27 Oktober 2023	Rapat Pembahasan Awal Nota Kesepahaman antara Ombudsman RI dan BP Tapera tentang Peningkatan Kualitas Layanan Publik di Lingkungan BP Tapera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keasistenan Utama III 2. Tim Kerja Sama
19	31 Oktober 2023	Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan beberapa Perguruan Tinggi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan 2. Tim Kerja Sama 3. Universitas Lambung Mangkurat 4. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
20	1 November 2023	Pembahasan Konsep Perjanjian Kerja Sama antara Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan Ombudsman Republik Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Hukum; 2. Tim Kerja Sama.
21	1-3 November 2023	Rapat Intensif (Konsinyering Fullday Meeting) Tanggal 1-3 November 2023 Dalam Rangka Perencanaan Timeline Evaluasi Kerja Sama Dan Fasilitasi Magang Di Lingkungan Ombudsman RI Serta Persiapan Kegiatan Leadership Meeting South East Asian Ombudsman Forum (SEAOF) dan SEAOF+	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Kerja Sama 2. Panitia SEAOF

22	10 November 2023	Penelitian Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta di Kantor Ombudsman RI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Kerja Sama 2. Kelompok PSDM
23	13 November 2023	Penjajakan Kerja Sama antara Ombudsman RI dan PT. Kereta Api Indonesia	Tim Kerja Sama
24	16 November 2023	Pembahasan Teknis Pelaksanaan Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Ombudsman RI dengan 5 Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Riau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Kerja Sama 2. Bagian Protokol 3. Tim Kerja Hubungan Masyarakat
25	21 November 2023	Audiensi dengan Politeknik STIA LAN Bandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi; 2. Tim Kerja Hubungan Masyarakat; 3. Tim Kerja Sama.
26	22 November 2023	Gladi Bersih Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Ombudsman RI dengan 5 Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Riau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Kerja Sama 2. Tim Kerja Hubungan Masyarakat 3. Tim Kerja Teknologi Informasi 4. Bagian Protokol Ombudsman RI 5. Bagian Protokol 5 Pemerintah Daerah di Riau
27	23 November 2023	Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Ombudsman RI dengan 5 Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Riau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Ombudsman RI 2. Anggota Ombudsman RI (Bp. Hery Susanto) 3. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Prov. Kalimantan Timur Walikota/Bupati dan yang mewakili
28	2 Desember 2023	Pembahasan Nota Kesepahaman antara Ombudsman RI dengan UIN Datokarama Palu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Kerja Sama Ombudsman RI 2. Tim Kerja Sama UIN Datokarama Palu 3. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah
29	5 Desember 2023	Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ombudsman RI dan Universitas Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Jenderal Ombudsman RI 2. Tim Kerja Sama 3. Bagian Protokol
30	6 Desember 2023	Rapat Pembahasan Nota Kesepakatan antara Ombudsman RI dengan Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Kerja Sama 2. Bagian Kerja Sama Pemkot Bontang 3. Bagian Kerja Sama Pemkab Kutai Barat

31	7 Desember 2023	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Ombudsman RI dan Kementerian Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Ombudsman (Bp. Hery Susanto) 2. Keasistenan Utama V 3. Bagian Protokol 4. Tim Kerja Sama 5. Tim Kerja Hubungan Masyarakat
32	7 Desember 2023	Audiensi dengan Hukumonline	<ol style="list-style-type: none"> 6. Tim Kerja Sama 7. Tim Hukum
33	8 dan 11 Desember 2023	Rapat intensif (konsinyering fullday meeting) tanggal 8 dan 11 Desember 2023 dalam rangka penyusunan sistem fasilitasi layanan magang dan survei layanan kepuasan layanan kerja sama dan magang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Kerja Sama 2. Tim Kerja Teknologi Informasi 3. Tim Kerja Hubungan Masyarakat 4. Magang
34	11 Desember 2023	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Ombudsman Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Ombudsman RI 2. Anggota Ombudsman RI (Bp. Yeka Hendra Fatika) 3. Tim Kerja Sama 4. Tim Hubungan Masyarakat 5. Bagian Protokol
35	11 Desember 2023	Gladi Bersih Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Ombudsman RI dengan 5 Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur	<ol style="list-style-type: none"> 5. Tim Kerja Sama 6. Tim Kerja Hubungan Masyarakat 7. Tim Kerja Teknologi Informasi 8. Bagian Protokol Ombudsman RI 9. Bagian Protokol 5 Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur
36	12 Desember 2023	Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Ombudsman RI dengan 5 Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur	<ol style="list-style-type: none"> 4. Ketua Ombudsman RI 5. Anggota Ombudsman RI (Bp. Hery Susanto) 6. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Prov. Kalimantan Timur 7. Walikota/Bupati dan yang mewakili
37	22 Desember 2023	Rapat Pembahasan Lanjutan Rencana Perpanjangan Kesepahaman Bersama Ombudsman RI dengan Perpustakaan Nasional RI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas Perpusnas RI 2. Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi 3. Tim Hukum 4. Tim Kerja Sama 5. Tim Perpustakaan
38	27 Desember 2023	Rapat pembahasan Survey Kepuasan Layanan Kerja Sama dan Layanan magang	Tim Kerja Sama



Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Informasi Pusat oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia di Tangerang, Banten.



Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Kerja Sama antara Ombudsman RI dan PT. Pos Indonesia (Persero)

Pembahasan rencana kerja sama antara Ombudsman RI, Komisi Informasi Pusat dan Komisi Disabilitas Nasional



Pembahasan Perjanjian Kerja Sama antara Ombudsman RI dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dihadiri oleh Sekretaris ITJEN Kementerian Perhubungan, Tim Hukum Ombudsman RI, dan Tim Kerja Sama Ombudsman RI di Jakarta



Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dengan 5 Pemerintah Kabupaten di wilayah Provinsi Riau (Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti) oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia dan disaksikan oleh Anggota Ombudsman RI pengampu wilayah Provinsi Riau di Jakarta



Penandatanganan PKS antara Ombudsman RI dan Kemenhub RI oleh Anggota Ombudsman RI (Bp. Hery Susanto)



Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Ombudsman RI dengan Pemkot Bontang dan Pemkab Kutai Barat

b) Fasilitasi Magang terdiri dari:

Fasilitasi penerimaan mahasiswa magang yang dilakukan oleh sub kelompok Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tahapan sebagai berikut:

- 1) Seleksi Administrasi kelengkapan dokumen.
- 2) Verikasi data dan ketersediaan tempat magang pada Unit-unit kerja.
- 3) Wawancara peserta calon magang.
- 4) Perkenalan dan Orientasi Mahasiswa Magang.
- 5) Penempatan mahasiswa magang.

Penerimaan mahasiswa magang sampai dengan Desember 2023 berjumlah 89 orang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Universitas	Periode Magang	Penempatan Magang
1	Melinda Nurdin	UPN Veteran Jakarta	19 Des 2022 s/d 28 April 2023	KU MPM
2	Sania Athilla Sanjaya	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta	Oktober 2022 s/d Januari 2023	BIRO AP4
3	Haykal Muhammad Jihafan	Universitas Diponegoro	26 Des 2022 s/d 10 Feb 2023	KU IV
4	Allysha Yahya	Universitas Diponegoro	3 Jan s/d 3 Feb 2023	BIRO AP4
5	Larasati Dwi Pramono	Universitas Sebelas Maret	3 Jan s/d 3 Feb 2023	BIRO AP4
6	Malida Salsabila Putri	Universitas Sebelas Maret	3 Jan s/d 3 Feb 2023	BIRO AP4
7	Syifa Mufida Rahma	Universitas Sebelas Maret	3 Jan s/d 3 Feb 2023	KU III
8	Abigail T.harida Patricia	UPN Veteran Jakarta	3 Jan s/d 3 Feb 2023	KU MPM
9	Dhea Anggun Safitri	Universitas Airlangga	4 Jan s/d 4 Feb 2023	KU MPM
10	Bias Vilosa	Universitas Airlangga	4 Jan s/d 4 Feb 2023	KU MPM
11	Umilla Nur Allisya	Universitas Airlangga	4 Jan s/d 4 Feb 2023	Jakarta Raya
12	Eunike Putri	UPN Veteran Jakarta	Januari s/d Februari 2023	BIRO RENKEU
13	Stefani Angeles	Kalbis Institut	6 Feb s/d 6 April 2023	KU MPM
14	Wendy Handoko	Universitas Bakrie	16 Februari - 16 April 2023	BIRO RENKEU
15	Raihan Fadilah	Universitas Bakrie	16 Maret - 16 Juni 2023	BIRO SDMU
16	Yulia Zaa Hudna	Universitas Nasional	Maret 2023 s/d Agustus 2023	Biro HKO
17	Warih Anak Aji Samodro	Universitas Budi Luhur	Maret s/d Juni 2023	Biro MPM
18	Ratri Puspita Sari	Universitas Budi Luhur	Maret s/d Juni 2023	KU MPM
19	Fadhila Rihadatul Aisy	Universitas Budi Luhur	Maret s/d Juni 2023	KU II
20	Sabrina Kartika Wulan	Universitas Muhammadiyah Jakarta	Maret s/d Agustus 2023	KU VI
21	AnisaNurmaida	Universitas Muhammadiyah Jakarta	Maret s/d Agustus 2024	Biro HKO & KU VI
22	Desti Setiawati	Universitas Muhammadiyah Jakarta	Maret s/d Agustus 2025	KU VII
23	Farhani	Universitas Muhammadiyah Jakarta	Maret s/d Agustus 2026	KU IV & KU II
24	Muthia Shabrina	Universitas Muhammadiyah Jakarta	Maret s/d Agustus 2027	Biro HTI
25	Deandy Zahran Vierdiansyah	Universitas Pendidikan Indonesia	Maret s/d Juni 2023	KU III
26	Joshua Stanggang	Universitas Bakrie	13 Maret s/d 13 Mei 2023	Biro SDMU
27	Nila Syarifah Aztah	STIA LAN	19 Juni s/d 03 Agustus 2023	Biro SDMU
28	Alfini Yahria	STIA LAN	20 Juni s/d 03 Agustus 2023	Biro HKO
29	Muhammad Raamadhani Isandar	STIA LAN	21 Juni s/d 03 Agustus 2023	Biro AP4
30	Harfinandjati	Universitas Diponegoro	Juni s/d Juli 2023	Biro AP4
31	Sultan Zachri	Universitas Diponegoro	Juni s/d Juli 2023	KU III
32	Rosalia Mumtaz	Universitas Negeri Padang	20 Juni s/d 19 Agustus 2023	KU III
33	Nadya Ananda Putri	Universitas Pancasila	20 Juni s/d 19 Agustus 2023	Biro HKO
34	Muhammad Akbar Bagas Pratama	Universitas Diponegoro	04 Juli s/d 15 Agustus 2023	BIRO AP 4
35	Krisna Aryasatya Nugraha	Universitas Diponegoro	04 Juli s/d 15 Agustus 2023	Biro AP 4
36	Muhammad Zhaiff Henvianto	Universitas Diponegoro	4 Juli s/d 15 Agustus 2023	KU MPM
37	Ravi Himawan Shaputra Munandar	Universitas Diponegoro	4 Juli s/d 15 Agustus 2023	KU MPM
38	Gagas Syifa Subangkit	Universitas Diponegoro	4 Juli s/d 15 Agustus 2023	KU MPM
39	Rosa Putri Muzayana	Universitas Brawijaya	04 Juli s/d 04 Agustus 2023	Biro SDMU
40	Putri Riani	STIA LAN	04 Juli s/d 04 Agustus 2023	KU MPM
41	Febriana Andiani Putri	Universitas Gadjah Mada	03 Juli s/d 02 Agustus 2023	KU MPM
42	Aulia Putri Rezky	Universitas Gadjah Mada	03 Juli s/d 02 Agustus 2023	KU VII & KU MPM
43	Ghina Muthiah	Universitas Bakrie	17 Juli - 31 Oktober 2023	KU III
44	Audrey Ramadhina Rachmawanto	Universitas Sebelas Maret	1 Agustus 2022 s/d 1 Januari 2023	KU III
45	Aryanto Renaldi Sahala	Universitas Sebelas Maret	1 Agustus 2022 s/d 1 Januari 2023	KU VI
46	Raihan Ardiansyah	Universitas Sebelas Maret	1 Agustus 2022 s/d 1 Januari 2023	KU VI
47	Muhammad Rizqy Fajrian	Universitas Sebelas Maret	1 Agustus 2022 s/d 1 Januari 2023	KU V
48	M Agung Prayoga	Universitas Muhammadiyah Palangkaraya	01 Agustus s/d 31 Agustus 2023	KU V
49	Suluh Andoko	Universitas Muhammadiyah Palangkaraya	01 Agustus s/d 31 Agustus 2023	KU VI
50	Nabil Muechyar Pradipta	Universitas Sebelas Maret	Agustus 2023	KU VI
51	Anisa Sabrina Purnama	Universitas Sebelas Maret	Agustus 2023	Biro HKO
52	Sally Dian Nastily	Universitas Tarumanegara	18 Agustus - 01 Desember 2023	Biro HKO
53	Firyal Arribah Syafiqoh	Universitas Tarumanegara	18 Agustus - 01 Desember 2023	Biro AP IV
54	Nadya Ramadhani Suherwin	Universitas Jenderal Soedirman	01 Agustus - 01 Desember 2023	Biro HTI
55	Albert Jonathan Panggabean	Universitas Kristen Satya Wacana	08 Agustus - 08 November 2023	KU VII & Biro HKO
56	Rendy Agustinus Loupaty	Universitas President	01 Agustus s/d Oktober 2023	KU MPM
57	Audrey Putri Shaleha	Universitas Padjajaran	Agustus 2023	Biro HKO
58	Ardhia Pambudi Elysa Maharani	Universitas Pertamina	01 Agustus s/d 29 September 2023	Biro HKO
59	Monica Inkanttrin Silaban	Universitas Pertamina	01 Agustus s/d 29 September 2023	KU I
60	Shafa Nabila	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Agustus 2023	KU IV
61	Aulia Anggita Putri	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Agustus s/d September 2023	Biro MPM
62	Nur Khoirifah Syafitri	Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama)	15 Agustus s/d 31 September 2023	KU III
63	Dede Diah Rahmawati	Universitas Budi Luhur	27 September - 13 Desember 2023	Biro SDMU
64	Fhina Ruslana	Universitas Bina Sarana Informatika	06 September - 30 November 2023	Biro SDMU
65	Fadhita Fahrin	Universitas Bina Sarana Informatika	06 September - 30 November 2023	Biro HTI
66	Sabrina Kurnia	Universitas Bina Sarana Informatika	26 September - 26 Desember 2023	Biro HTI
67	Muhammad Zaldi Adhitya	Universitas Bina Sarana Informatika	26 September - 26 Desember 2023	Biro HTI
68	Daffa Aditya Rahman	Universitas Bina Sarana Informatika	26 September - 26 Desember 2023	Biro HTI
69	Dwi Firmanto	Universitas Bina Sarana Informatika	26 September - 26 Desember 2023	Biro HTI
70	M. Farhanul Islam Ramadhan	Universitas Bina Sarana Informatika	26 September - 26 Desember 2023	KU MPM
71	Ulfa Rahma Yustisia	Universitas Bakrie	01 September - 31 Oktober 2023	KU MPM
72	Ristiani	Universitas Bakrie	01 September - 30 November 2023	KU VI
73	Ria Silva Anjani	Universitas Bakrie	01 September - 30 November 2023	KU III
74	Nurvinda Putri anjani	Universitas Budi Luhur	27 September - 13 Desember 2023	KU MPM
75	Alyssa Farisa Yasmine	Universitas Budi Luhur	September - November 2023	KU RESMON
76	Ilham Hamadi	Universitas Budi Luhur	September - November 2023	KU IV
77	Raul Dafa Prayoga	Universitas Budi Luhur	September - November 2023	KU II
78	Allyv Tashali	Universitas Bakrie	28 September - 28 Desember 2023	Biro HTI
79	Muhammad Rafi Goutama Gunandi	Universitas Muhammadiyah Jakarta	September - November 2023	KU IV
80	Alifka Cellina	Universitas Airlangga	25 Oktober - 25 November 2023	KU MPM
81	Safina Innaf Mia Ardella	Universitas Airlangga	26 Oktober - 25 November 2023	KU MPM
82	Tere Thierry Timothy	Universitas Gadjah Mada	Oktober - Desember 2023	BIRO HKO
83	Aulia Nurrahman	Universitas Al- Azhar Indonesia	02 Oktober - 30 November 2023	BIRO RENKEU
84	Dominegoe Putumika Pandanbuana	LSPR Communication dan Business Institute	1 November - 1 April 2023	KU VI dan BIRO HTI
85	Aghnia Abidina Rudian	Universitas Gadjah Mada	13 November - 16 Februari 2024	KU VI
86	Rinaldy Mahmudin	STIH IBLAM	20 November - 20 Januari 2024	KU RESMON
87	Mira Azzahra	Universitas Brawijaya	20 November - 20 Desember 2023	BIRO HKO dan BIRO AP4
88	Fefi Ade Rahmawati	Universitas Brawijaya	20 November - 20 Desember 2023	BIRO HKO dan BIRO AP4
89	Nisrina	Universitas Brawijaya	Desember 2023 - Januari 2024	BIRO AP4
90	Salma Nur Fauziah	Politeknik STIA LAN Jakarta	Desember 2023 - Januari 2024	BIRO KHO
91	Lathifa Kalsum	Politeknik STIA LAN Jakarta	Desember 2023 - Januari 2024	BIRO HKO
92	Marsalya Pusparani	Politeknik STIA LAN Jakarta	Desember 2023 - Januari 2024	BIRO HKO

Sebagian peserta magang berasal dari perguruan tinggi yang telah menjadi mitra Ombudsman RI melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama. Program Magang ini merupakan implementasi atau pelaksanaan kerja sama yang terjalin antara Mitra Perguruan Tinggi dan Ombudsman RI.

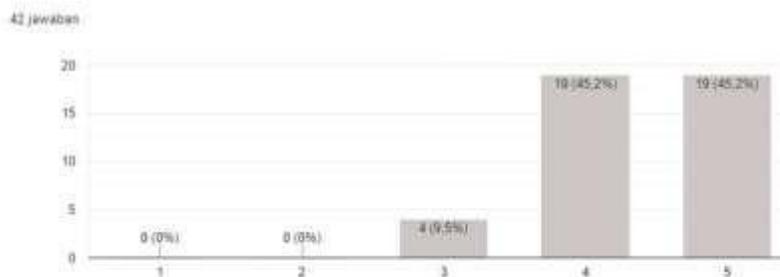
c) Survey Layanan Kerja Sama Semester I Tahun 2023

Pada Semester II Tahun 2023 telah dilaksanakan survey kepuasan terhadap layanan kerja sama dengan pengambilan data mulai tanggal 29 Desember 2023 hingga 9 Januari 2024 dengan jumlah responden 42 orang meliputi unit kerja pusat dan perwakilan dan respon survei menggunakan skala likert 1-5 terhadap 6 pertanyaan penilaian. Dari hasil penghitungan didapatkan indeks kepuasan layanan kerja sama sebesar 85,56 dengan rincian sebagai berikut :

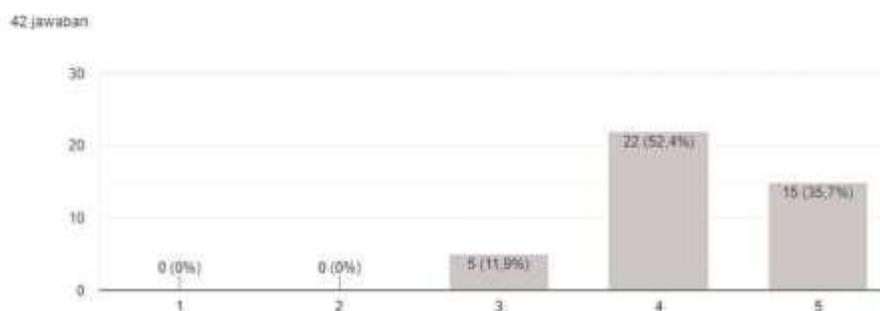
Saya puas terhadap kemudahan dalam mengakses informasi kerja sama, memenuhi persyaratan kerja sama, dan responsif pegawai dalam menanggapi permohonan kerja sama di Ombudsman RI.



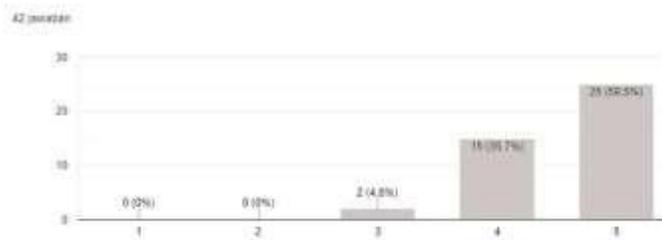
Saya puas terhadap layanan Unit Kerja Sama di Biro HKO karena pegawai di unit tersebut dapat merindakanjuti permohonan dan memberikan layanan kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Saya puas karena sarana dan prasarana di Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisas Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi sangat mendukung dalam pelaksanaan kerja sama.



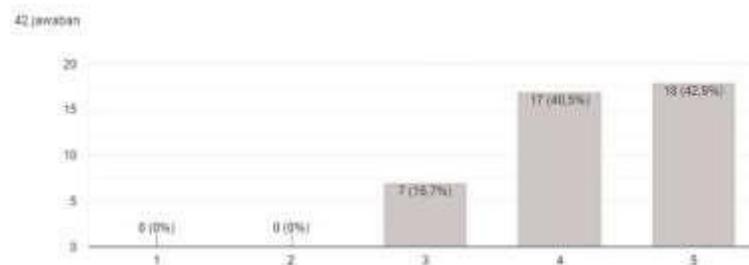
Saya puas terhadap kemudahan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pegawai dalam layanan kerja sama di Ombudsman RI.



Saya puas terhadap layanan kerja sama karena pegawai di Unit Kerja Sama di Biro HKO dapat memfasilitasi layanan kerja sama dengan baik.



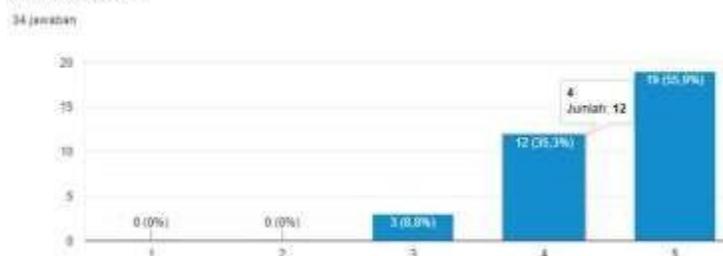
Saya puas karena pegawai di Unit Kerja Sama di Biro HKO solutif terhadap situasi dan kondisi saat pelaksanaan kerja sama.



d) Survey Layanan Magang Semester II Tahun 2023

Pada Semester II Tahun 2023 telah dilaksanakan survey kepuasan terhadap layanan magang dengan pengambilan data mulai tanggal 29 Desember 2023 hingga 9 Januari 2024 dengan jumlah responden 33 orang meliputi unit kerja pusat dan perwakilan dan respon survei menggunakan skala likert 1-5 terhadap 6 pertanyaan penilaian. Dari hasil penghitungan didapatkan indeks kepuasan layanan magang sebesar 90,20 dengan rincian sebagai berikut :

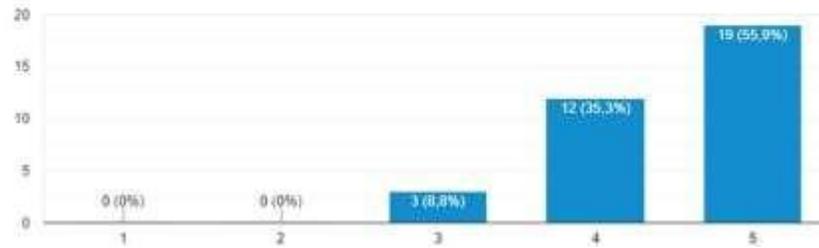
Saya puas terhadap kemudahan dalam mengakses informasi magang, memenuhi persyaratan magang, dan responsif pegawai dalam menanggapi permohonan magang di Ombudsman RI.



Saya puas terhadap layanan magang karena pegawai di Unit Kerja Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi dapat menindaklanjuti permohonan dan memberikan layanan magang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[Salin](#)

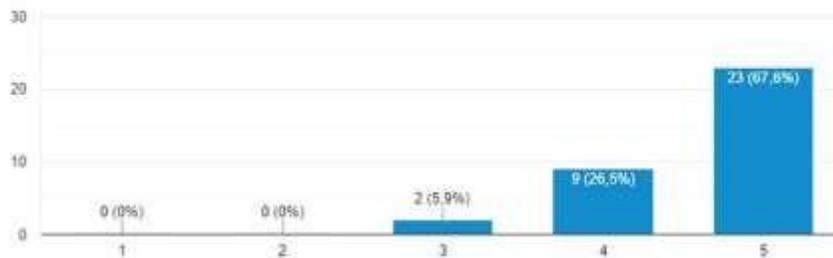
34 jawaban



Saya puas terhadap kemudahan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pegawai sehingga mendapatkan bimbingan mengenai tugas/pekerjaan di Ombudsman RI.

[Salin](#)

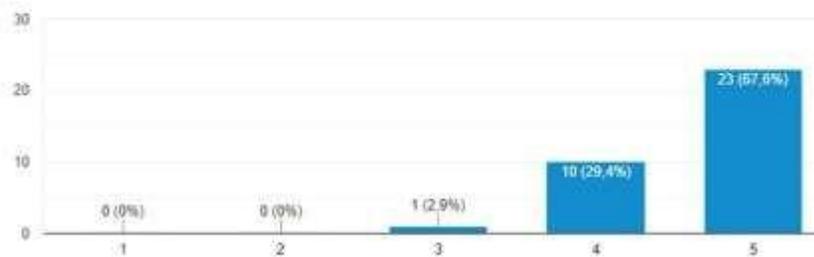
34 jawaban



Saya mendapatkan banyak pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan di bidang pemerintahan dan/atau pelayanan publik di Ombudsman RI.

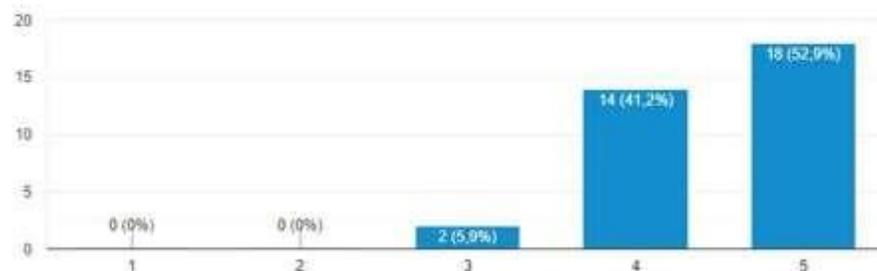
[Salin](#)

34 jawaban



pelaksanaan magang di Ombudsman RI.

34 jawaban



e) Penelitian Mahasiswa

Fasilitasi penelitian mahasiswa yang dilaksanakan oleh kelompok kerja sama hingga Desember 2023, adalah sebagai berikut :

1. Lusi Rahmi, permohonan tanggal 31 Januari 2023, asal Universitas Brawijaya, Program Studi S1 - Ilmu Pemerintahan, Narasumber Elisa Luhulima, Judul Penelitian “Implementasi Pengawasan oleh Ombudsman RI pada Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Studi Kasus Maladministrasi Pelayanan Kepesertaan dan Penjaminan Sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan Pada Tahun 2021)“;
2. Mursida Mursalim, permohonan tanggal 25 Januari 2023, asal Universitas Gadjah Mada, Program Studi S2 - Ilmu Hukum, Narasumber Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman RI, Judul Penelitian “Prospek Penerapan Ombudsprudence Dalam Penanganan Pelanggaran Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI“;
3. Alief Al Baihaqi, tanggal permohonan 03 Februari 2023, asal Universitas Dr. Moestopo (Beragama), Program Studi S1 - Administrasi Publik, Penelitian Dilakukan di Perwakilan Jakarta Raya;
4. Kamila Sabila, tanggal permohonan 25 Februari 2023, asal Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi S1 - Teknik Informatika, Judul Penelitian “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik pada Ombudsman RI dengan Menggunakan *Metode Analytical Hierarchy Process*“.
5. Ahmad Raditya Yunizar, permohonan tanggal 28 Maret 2023, asal Universitas Riau, Program Studi S1 - Ilmu Hukum, Narasumber Nugroho Andriyanto (Kepala Keasistenan Utama I), wawancara/penelitian dilakukan pada tanggal 6 April 2023.
6. Adinda Fitri Emilia, permohonan tanggal 12 Juni 2023, asal Universitas Islam 45 Bekasi, Program Studi S1 - Ilmu Administrasi Negara, Narasumber Eko Martono (Keasistenan Utama I) dan Syahrizal Hagi Nugroho (Analisis Kerja Sama), Judul Penelitian “Collaborative Governance Pengawasan Pelayanan Publik (Implementasi Kerja Sama Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri)“.
7. Shanty Deviani, permohonan tanggal 12 Juni 2023, asal Universitas Islam 45 Bekasi, Program Studi S1 - Ilmu Administrasi Negara, Narasumber Eko Martono (Keasistenan Utama I) dan Syahrizal Hagi Nugroho (Analisis Kerja Sama), Judul Penelitian yaitu Implementasi Kerja Sama Ombudsman RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

f) **Fasilitasi Kunjungan Kelembagaan dan/atau Perguruan Tinggi**

Fasilitasi penerimaan kunjungan kelembagaan atau perguruan tinggi dalam negeri yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Sama mulai Januari hingga Juni 2023 adalah sebagai berikut :

1. Kunjungan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS – SJK) dilaksanakan pada Hari Jumat, Tanggal 17 Maret 2023 dalam rangka peninjauan kerja sama terkait peningkatan pengawasan pelayanan publik serta pemahaman tentang penyelesaian sengketa jalur non-litigasi (mediasi dan arbitrase);
2. Kunjungan SMA Diponegoro Jakarta dilaksanakan pada Hari Jumat, Tanggal 17 Maret 2023 yang dihadiri oleh 55 orang peserta didik serta 2 guru pendamping dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan peserta didik dalam berorganisasi, mengetahui tugas fungsi Ombudsman RI dan ajang bertukar informasi seputar pengelolaan organisasi.
3. Kunjungan Universitas Nasional Jakarta tanggal 12 Juni 2023, diikuti oleh peserta sebanyak 80 mahasiswa, kunjungan dimaksud diterima oleh Bapak Johannes Widijantoro (Anggota Ombudsman RI) dengan memberikan kuliah umum kepada peserta kunjungan.
4. Kunjungan Universitas Pancasila tanggal 16 Juni 2023, diikuti oleh peserta sebanyak 70 mahasiswa, kunjungan dimaksud diterima oleh Kepala Keasistenan Utama VII dengan memberikan diskusi/kuliah umum.
5. Kunjungan Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Program Studi Hukum Tata Negara pada hari Rabu, 21 Juni 2023 di ikuti oleh 147 orang mahasiswa beserta dosen pendamping. Kunjungan dimaksud diterima oleh Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi IV dengan memberikan kuliah umum dan diskusi bersama para peserta kunjungan.

2) Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri

Kegiatan yang dilakukan oleh sub kelompok Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri, yaitu;

a) **Perencanaan Kegiatan dan Anggaran**

1) **Penyusunan KAK dan RAB Revisi 2024**

Pada bulan Januari 2024 telah dilakukan penyusunan KAK dan RAB revisi Tahun Anggaran 2024 untuk penyesuaian RO dan target program Pelaksanaan Fasilitasi Forum Internasional dan Pelaksanaan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri

2) **Penyusunan Rencana dan Jadwal Fasilitasi KSLN**

Mengawali tahun 2023, telah dilakukan penyusunan rencana dan jadwal kegiatan fasilitasi kerja sama luar negeri. Dalam penyusunan jadwal ini, dilakukan koordinasi dengan unit terkait lainnya di Ombudsman RI dan mitra eksternal.

3) Usulan Penambahan Anggaran Tahun 2024

- Pada bulan Mei 2023 telah dilakukan penyesuaian KAK dan RAB Tahun Anggaran 2024 untuk usulan penambahan anggaran tahun 2024. Penambahan kebutuhan anggaran ini didasarkan pada peran dan tugas yang diemban Ombudsman RI sebagai Ketua sekaligus Sekretariat *South East Asian Ombudsman Forum* (SEAOF) periode 2023-2024. Selain itu, keikutsertaan Ombudsman RI dalam keanggotaan organisasi internasional juga menjadi pertimbangan dalam pengusulan anggaran tambahan.
- Oktober 2023, berupa penambahan anggaran sebesar Rp 889.740.000 untuk pelaksanaan Pertemuan SEAOF dan SEAOF+ tanggal 6-9 November 2023, serta keikutsertaan dalam Konferensi Internasional di Rusia (atas undangan Ombudsman Rusia).
- November 2023, dilakukan revisi internal (KPA) dalam rangka optimalisasi penggunaan anggaran TA 2023, serta mendukung pelaksanaan Leadership Meeting bersama Ombudsman Belanda di Jawa Barat.

b) Kerja Sama dengan *Office of Commonwealth Ombudsman* (OCO)

Kerja sama Ombudsman RI dan *Office of Commonwealth Ombudsman* (Australia) telah terjalin sejak tahun 2000, dan saat ini kerja sama kedua lembaga berada di bawah program PROSPERA (*Australia Indonesia Partnership for Economic Development*) untuk kurun waktu 2018-2026.

Program yang dilaksanakan hingga paruh tahun 2023 merupakan kelanjutan dari program yang telah disepakati tahun 2022, dengan rincian berikut:

1) Pelatihan Intake Batch 2

Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu 22-23 Februari 2023.

2) Pelatihan Mediasi

Pelatihan dilaksanakan secara daring tanggal 14, 15, 16, 17, dan 20 Maret 2023, diikuti 13 Asisten (12 sebagai peserta dan 1 sebagai *Observer*).

3) Kunjungan Kerja dan Seminar

Kunjungan kerja OCO diawali dengan *courtesy meeting* antara pimpinan Ombudsman RI dan Commonwealth Ombudsman Mr. Iain Anderson, yang baru mulai bertugas Agustus 2022 hingga 2027, pada tanggal 15 Maret 2023.

4) Menerima kunjungan kerja Ketua Commonwealth Ombudsman, Mr. Iain Anderson, yang baru mulai bertugas Agustus 2022 hingga 2027 pada bulan Mei

2023, Ombudsman RI juga telah mengirimkan Surat Dukungan atau Support Letter untuk OCO yang ditujukan kepada Department of Foreign Affairs and Trade Australia sebagai dukungan atas kerja sama yang berlangsung.

5) Training of Trainers

Pelatihan berjudul *“Impactful Presentation and Facilitation Skill”* dilaksanakan secara daring tanggal 8 – 9 Mei dan 11-12 Mei 2023, diikuti oleh total 24 orang yang terdiri dari 2 Kepala Perwakilan, 1 Asisten Madya, 19 Asisten Muda, dan 2 Asisten Pratama.

6) *The Commonwealth Ombudsman online Complaints Handling Forum*

Office of Commonwealth Ombudsman (OCO) mengadakan The Commonwealth Ombudsman online Complaints Handling Forum yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 6-9 Juni 2023. Forum ini dibagi menjadi 4 (empat) sesi virtual yang disampaikan dalam Bahasa Inggris.

7) *Women in Leadership.*

OCO menjadi tuan rumah dan memfasilitasi diskusi mengenai Perempuan dalam Kepemimpinan atau Women in Leadership antara 5 (lima) pegawai perempuan senior dari Kantor Ombudsman Australia (OCO) and 5 (lima) pegawai perempuan dari Ombudsman Republik Indonesia ORI pada tanggal 27 Juni 2023.

8) Pengembangan Website Ombudsman RI Ramah Disabilitas Netra sebagai bagian dari program outreach yang disusun oleh Ombudsman RI dan OCO, dilakukan pengembangan website Ombudsman RI agar menjadi lebih inklusif dan ramah disabilitas netra, yaitu dengan penambahan portal yang merubah suara menjadi tulisan atau sebaliknya.

9) Ketua Ombudsman OCO, Mr. Iain Anderson, menghadiri pertemuan SEAOF+ yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 8 November 2023. Sebagai rangkaian dari kunjungan tersebut, delegasi OCO juga melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat Ombudsman RI di Jakarta tanggal 6 November 2023 dan Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi DI Yogyakarta tanggal 7 November 2023.

10) Pada bulan Desember 2023 juga dilakukan rapat penyusunan agenda kegiatan ORI-OCO Semester 2 2023/24, yaitu untuk Januari-Juni 2024 (mengikuti Fiscal Year Australia, yaitu Juli 2023-Juni 2024). Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2023 melalui Zoom.

c) Kerja Sama dengan Ombudsman Belanda dan CILC

Sampai dengan triwulan IV tahun 2023 telah dilakukan pertemuan secara daring maupun luring dalam rangka pelaksanaan program kerja Ombudsman RI dan

Ombudsman Belanda, yang difasilitasi oleh CILC. Pada tanggal 21 Maret 2023 dilakukan pertemuan luring antara CILC dan Ombudsman RI, dilanjutkan pertemuan daring dengan Ombudsman Belanda.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati pelaksanaan *leadership retreat* yang akan diikuti pimpinan Ombudsman RI dan Ombudsman Belanda pada bulan Desember 2023 di Bandung. CILC dan Ombudsman Belanda juga akan memfasilitasi audiensi antara Ombudsman RI dan Ms Maike de Lange terkait peran Ombudsman dalam SDGs.

Kerja Sama dengan Ombudsman Belanda dan CILC juga mengadakan Webinar Peran Ombudsman RI dalam Mendukung Tujuan SDGs.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda 2030, yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. Ombudsman RI, sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, turut mendukung tujuan dari SDGs, terutama tujuan 16 yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Ombudsman RI bersama dengan Center for International Legal Cooperation (CILC), menyelenggarakan Webinar mengenai peran Ombudsman RI dalam mendukung tujuan SDGs pada tanggal 15 Juni 2023. Webinar tersebut menghadirkan Ibu Maike de Langen, sebagai narasumber, dengan Insan Ombudsman RI sebagai peserta.

Di akhir tahun 2023 Ombudsman RI telah mulai menyusun rancangan Renstra dan Grand Design Ombudsman RI (2025-2045). Dalam rangka memperkaya ide dan masukan dalam penyusunan kedua dokumen perencanaan tersebut, diselenggarakan pertemuan intensif antar Pimpinan Ombudsman RI, dengan Tim Ombudsman Belanda dan CILC bertindak sebagai fasilitator dan moderator. Dalam pertemuan ini, Pimpinan Ombudsman RI memaparkan rencana 20 tahun ke depan melalui sejumlah transformasi, antara lain kelembagaan, SDM, Peran, dan Digitalisasi.

Dalam Leadership Meeting ini juga terjadi pertukaran ide dan pengalaman antara pimpinan Ombudsman RI dan Ombudsman Belanda. Kegiatan dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat, tanggal 18-21 Desember 2023.

d) *South East Asian Ombudsman Forum (SEAOF)*

Ombudsman RI telah memulai tugas sebagai Ketua dan menjalankan Sekretariat SEAOF sejak 8 Desember 2022. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2023, telah dilakukan berbagai kegiatan dan persiapan sebagai berikut:

1) *Senior Official Meeting (SOM) 1*

Dilakukan secara daring, dihadiri oleh Ombudsman RI, Ombudsman Filipina, dan Ombudsman Thailand, dengan agenda:

- Update dari anggota SEAOF
- Penyusunan jadwal kegiatan SEAOF

Dalam pertemuan ini juga dibahas mengenai mekanisme pembahasan penerimaan anggota baru SEAOF dan pengembangan website SEAOF.

- 2) FGD *“Introduction to the Mandates and Functions of SEAOF Member Institutions”* Sebagai kegiatan pertama, SEAOF akan mengadakan FGD berjudul *“Introduction to the Mandates and Functions of SEAOF Member Institutions”* tanggal 25 Mei 2023 secara daring. SOM SEAOF telah menyusun KAK kegiatan dan melakukan *technical meeting* secara daring pada tanggal 27 Maret 2023.

- 3) Persiapan Pelaksanaan Senior Official Meeting (SOM) SEAOF dan SEAOF+ Retreat

Sebagai Ketua SEAOF, Ombudsman RI memiliki kewajiban menyelenggarakan pertemuan tingkat teknis dan pimpinan paling sedikit 1 kali dalam setahun. Ombudsman RI bermaksud untuk menyelenggarakan kedua pertemuan tersebut secara luring pada bulan Agustus dan November 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan berbagai persiapan, antara lain:

- Survei lokasi di Provinsi Belitung pada tanggal 3-5 Mei 2023
- Survei lokasi di Provinsi Bali pada tanggal 15-17 Mei 2023

Dalam survei tersebut, dilakukan pengecekan hotel yang representatif untuk tempat pertemuan serta kegiatan cultural. Selain itu, dilakukan juga peninjauan ke Pemerintah Daerah di masing-masing provinsi.

- 4) FGD *“Introduction to the Mandates and Functions of SEAOF Member Institutions”* Sebagai kegiatan pertama, SEAOF menyelenggarakan FGD berjudul *“Introduction to the Mandates and Functions of SEAOF Member Institutions”* tanggal 25 Mei 2023 secara daring. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah staf dari Ombudsman RI, Ombudsman Thailand, dan Ombudsman Filipina.

Dalam kesempatan ini, para pembicara memaparkan tentang lembaganya masing-masing, antar lain mengenai kelembagaan, tugas dan fungsi, mekanisme pengaduan/penyelesaian laporan, pencegahan, dan lainnya.

- 5) Ombudsman RI menyelenggarakan pertemuan SEAOF dan SEAOF+ pada tanggal 6-9 November 2023 di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, sebagai Ketua dan pelaksana Sekretariat SEAOF periode 2023-24. Kegiatan dibagi menjadi 2, yaitu;
- 1) pertemuan SEAOF tanggal 7 November 2023 dihadiri oleh anggota SEAOF: Ombudsman RI, Ombudsman Filipina, Ombudsman Thailand dan 2 anggota baru, Ombudsman Timor Leste dan Ombudsman New Zealand.
 - 2) Pertemuan SEAOF+ tanggal 8 November 2023, dihadiri oleh 5 anggota SEAOF dan undangan: Commonwealth Ombudsman, Ombudsman Hong Kong, dan

Biro Pengaduan Malaysia. Dalam pertemuan ini dilakukan pengenalan SEAOF ke lembaga Ombudsman lainnya serta membahas tentang isu-isu strategis bersama, seperti SDGs dan kemungkinan kolaborasi ke depan.

e) *International Ombudsman Institute (IOI)*

1) IOI Asian Regional Meeting

Ombudsman Thailand sebagai Presiden Regional Asia IOI akan menyelenggarakan IOI Asian Regional Meeting 2023 tanggal 9-13 Juli 2023 di Bangkok, Thailand. Melalui pertemuan ini diharapkan seluruh anggota regional Asia IOI dapat berkumpul untuk berkolaborasi dan berdiskusi tentang penguatan komunitas Ombudsman Asia. Selain itu, pertemuan ini juga dapat menjadi tempat untuk berbagi ide atas kegiatan regional yang dapat mendukung tujuan dan rencana strategis IOI.

Ombudsman Republik Indonesia telah menyampaikan laporan untuk IOI Asian Regional Meeting 2023 dan Board of Director Meeting IOI terkait capaian Ombudsman RI selama tahun 2022. Selain itu, Ombudsman RI juga berpartisipasi dalam *pre-event survey 'Measuring needs for the IOI services among IOI Asian member institutions 2023'*, yang disusun oleh Ombudsman Thailand, untuk mengukur kebutuhan para anggota IOI atas layanan IOI serta konfirmasi atas kehadiran di acara tersebut dan keinginan untuk menjadi salah satu pembicara dalam seminar.

2) IOI Best Practice

IOI mengirimkan *draft Best Practice Paper* dengan topik "*Whistleblower Protection*" yang disusun oleh State Comptroller dan Ombudsman Israel. Draft berisikan tentang pengalaman Israel dan diharapkan bermanfaat bagi seluruh Ombudsman yang tergabung dalam IOI. Sekretariat IOI mengundang seluruh anggota untuk memberikan masukan atas *draft* tersebut sebelum dipublikasi secara resmi di website IOI.

- 3) IOI melakukan pemilihan Dewan Direktur Regional Asia pada tanggal 24 Oktober 2023 melalui electronic ballot. Pemilihan tersebut diikuti oleh Ketua Ombudsman, Bapak Mokhammad Najih, bersama 3 kandidat lainnya yaitu: Yong-Hak Joo dan Hong Il Kim dari Korea Selatan, serta Somsak Suwansujarit dari Thailand. Berdasarkan hasil pemilihan, Ketua Ombudsman RI terpilih menjadi salah satu Dewan Direktur IOI Regional Asia, dan akan mulai bertugas pada Mei 2024, setelah pelantikan di General Assembly IOI Tahun 2024 di Belanda. Pada tanggal 1 November 2023, Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman RI mengikuti pertemuan pembahasan Tema IOI World Conference ke-13, yang difasilitasi dan dipandu oleh

Ombudsman Belanda sebagai tuan rumah pertemuan IOI 2024 dan Ombudsman Thailand sebagai Presiden IOI Regional Asia.

f) Asian Ombudsman Association (AOA)

1) Webinar on Informal Resolution of Dispute : *Pakistan's Experience*

Ombudsman RI mendapat undangan untuk mengikuti Webinar yang diselenggarakan oleh AOA dengan topik "*Informal Resolution of Dispute: Pakistan's Experience*" pada tanggal 14 Juni 2023. Webinar ini diikuti oleh Pimpinan, Asisten dan jajaran dari Sekretariat Jenderal Ombudsman RI.

2) Ombudsman RI mengikuti *General Assembly OICOA* tanggal 5-6 Oktober 2023 di Istanbul, Turki. Pada pertemuan tersebut, selain membahas sejumlah agenda rutin OICOA, dilakukan juga pemilihan Board of Director, dimana ketua Ombudsman RI, Bapak Mokhammad Najih, terpilih menjadi salah satu BoD OICOA.

g) *High Commissioner for Human Rights in the Russian Federation*

Undangan VII *International Scientific and Practical Conference "Issues of Human Rights Protection: Exchange of Best Practices of Ombudspersons"* oleh *High Commissioner for Human Rights in the Russian Federation* kepada Ombudsman RI merupakan bentuk nyata kerja sama yang telah dibangun melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* antara Ombudsman RI dengan *the High Commissioner for Human Rights in Russian Federation* dengan ruang lingkup pertukaran data dan informasi, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pengetahuan yang ditandatangani di Kazan, Federasi Rusia pada tanggal 12 September 2023. Kegiatan yang diselenggarakan tanggal 17 September 2023 di Moscow ini merupakan kesempatan baik bagi Ombudsman RI untuk lebih berperan dalam pertukaran pengetahuan dan informasi serta mengembangkan jejaring di antara lembaga Ombudsman di dunia. Selain Ombudsman RI, dimana Bapak Indraza Marzuki Rais bertugas sebagai Ketua Delegasi, konferensi ini juga dihadiri oleh 47 institusi Ombudsman dari Asia, Afrika dan Eropa dan bertujuan untuk saling bertukar pikiran, berbagi informasi serta pengalaman di antara para peserta dalam pengembangan kompetensi yang unik dan khas masing-masing institusi.

h) Kedutaan Thailand di Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia telah menjalin kerja sama dengan Ombudsman Thailand dalam kurun waktu yang cukup lama. Pada saat kegiatan SEAOF berlangsung di Yogyakarta, dilakukan bilateral meeting diantara keduanya, guna

membahas penguatan hubungan kerja sama dan pelayanan publik di kedua negara, salah satunya mengenai permasalahan bea cukai yang sedang dihadapi Kedutaan Thailand di Indonesia terkait pengiriman Patung Budha dari Thailand ke Indonesia. Pihak Kedutaan Thailand telah melakukan audiensi ke kantor Ombudsman RI guna menindaklanjuti hasil bilateral meeting tersebut, dan disepakati untuk turun langsung ke lokasi tujuan pengiriman Patung Budha, yaitu Medan guna melakukan koordinasi. Koordinasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2023 di Vihara Buddharatana, Medan dengan melibatkan Duta Besar Thailand untuk Indonesia, Konsul Kehormatan, Komunitas Budha di Medan, dan Ombudsman Republik Indonesia.

i) Pengawasan Pelayanan Publik di Malaysia dan Sosialisasi SEAOF

Sebagai pengawas penyelenggara pelayanan publik, Ombudsman RI bertugas untuk mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 10-12 Desember 2023 dilakukan pemantauan penyelenggaraan pelayanan publik oleh KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Penang di Malaysia, antara lain terkait kekonsuleran, imigrasi, bantuan hukum, dan lainnya. Selama pemantauan, Tim Ombudsman RI, yang dipimpin oleh Bpk Johannes Widijantoro, juga melakukan diskusi secara langsung dengan WNI di Kuala Lumpur dan Penang, serta melihat shelter milik KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Penang.

Dalam kesempatan tersebut, Tim Ombudsman RI juga melakukan pertemuan dengan Biro Pengaduan Awam (BPA) Malaysia di Putrajaya. BPA merupakan lembaga pengawas pelayanan publik di Malaysia, yang berada di bawah Kantor Perdana Menteri Malaysia. Dalam pertemuan, kedua lembaga bertukar informasi dan pengalaman terkait pengawasan dan pengaduan masyarakat, termasuk mengenai potensi penerimaan pengaduan dari WNI di Malaysia maupun WN Malaysia di Indonesia. Ombudsman RI juga turut melakukan sosialisasi terkait SEAOF dan mengajak BPA untuk bergabung ke SEAOF.

j) Lainnya

1) Penyusunan Buku Profil

Ombudsman Republik Indonesia sedang menyusun Buku Profil guna menyediakan informasi tentang Ombudsman RI kepada mitra di dalam negeri maupun luar negeri. Untuk menjamin kualitas penyusunan Buku Profil dimaksud, Ombudsman RI membentuk Tim Penyusun Buku Profil Ombudsman Republik Indonesia melalui Keputusan Ketua Ombudsman RI. Tim Penyusun Buku Profil telah melaksanakan

rapat intensif untuk menyusun draft Buku Profil. Draft yang telah ada akan disampaikan ke Pimpinan Ombudsman RI untuk mendapat masukan.

- 2) Penjajakan Kerja Sama dengan United Nation Development Program (UNDP)
Telah dilakukan penjajakan kerja sama antara Ombudsman Republik Indonesia dengan United Nation Development Program (UNDP) pada tanggal 9 Maret 2023. Salah satu tujuan dari pertemuan ini adalah melihat bagaimana Ombudsman RI dalam berperan dalam pemenuhan indikator SGDs oleh Indonesia.
Ombudsman RI memaparkan program-program terkait, antara lain mengenai Survey Kepatuhan, Kajian, Sahabat Ombudsman, serta memperkenalkan South East Asian Ombudsman Forum (SEAOF).
- 3) Penjajakan Kerja Sama dengan World Bank
Ombudsman Republik Indonesia menerima kunjungan Country Director World Bank, Satu Kahkonen, beserta jajaran dalam rangka penjajakan kerja sama pada tanggal 30 Maret 2023 di kantor Ombudsman RI. Delegasi World Bank diterima oleh Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus, dan Anggota Ombudsman RI, Johannes Widijantoro, beserta jajaran. Dalam pertemuan ini, Ombudsman RI memaparkan tugas dan fungsinya serta menyampaikan Keketuaan dan Sekretariat Ombudsman RI dalam South East Asian Ombudsman Forum (SEAOF).

c. Tim Kerja Organisasi dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi

Tim Kerja Organisasi dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Fasilitasi Kelembagaan, Fasilitasi Reformasi Birokrasi, dan Fasilitasi Tatalaksana sampai dengan akhir tahun 2023 telah melaksanakan:

1) Fasilitasi Kelembagaan;

- a) Penyusunan Matriks Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana berdasarkan Keputusan Menpan RB nomor 656 Tahun 2023.
- b) Melakukan penyusunan matriks perubahan nomenklatur Jabatan Pelaksana sesuai dengan Keputusan Menpan RB nomor 656 Tahun 2023, yang mana sebelumnya terdapat 101 Jabatan Pelaksana di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI menjadi 13 Jabatan yang terdiri dari Klasifikasi Jabatan klerek, operator, dan teknisi.

- c) Melakukan Koordinasi dengan Kedeputian SDM Aparatur Kemenpan RB pada tanggal 04 Oktober 2023 melalui zoom, dengan beberapa masukan sebagai berikut:
 1. Perlu diperhatikan kesesuaian background pendidikan dan klasifikasi pendidikan jabatan pelaksana yang akan disesuaikan.
 2. Harus memperhatikan jenjang pendidikan dengan kelas jabatan yang akan disesuaikan.
 3. Pada saat pengajuan validasi, perlu diajukan permohonan tenggat waktu penyesuaian pendidikan dengan jabatan yang akan disesuaikan.
 4. Perlu dilengkapi lampiran pengajuan perubahan nomenklatur sesuai dengan petunjuk dalam Keputusan Menpan RB nomor 656 Tahun 2023 dan dikirimkan beserta soft file dan hard filenya.

d) Penyusunan Pedoman Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Birokrasi.

Menindaklanjuti penataan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi sesuai dengan amanat Kemenpan RB nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, telah disusun Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Sistem Kerja Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagai dasar pembentukan tim kerja (*squad tim*) pada unit kerja agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat terlaksana lebih *agile*.



e) Penataan Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman, dilakukan pengajuan penetapan kebutuhan perpindahan dari jabatan lain dalam jabatan fungsional kepada Kemenpan RB dengan formasi yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pranata Komputer Ahli Pertama : 3 Formasi
- b. Pranata Komputer Terampil : 1 Formasi

- c. mengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama : 1 Formasi
- d. Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama : 5 Formasi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102 TAHUN 2023
TENTANG
PENTAPAN KEBUTUHAN PEKERJAAN
DARI JABATAN LAIN DALAM JARIFAN
PUNJUKRIL DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA TAMBAH ANGGARAN
2023

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI	LOKASI PEKERJAAN	LOKASI UNIT KERJA PEMERINTAH
Jumlah keseluruhan				
1	Posisi Manajer Ahli Pertama	5	2	Biro Hukum dan TI
2	Posisi Manajer Terampil	1	1	Biro Hukum dan TI
3	Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	1	1	Manajemen Pengadaan Barang/Jasa (Mn-PPM) dan Umum
4	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	5	5	Biro SDM dan Umum, Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA


Yang kemudian disampaikan kepada Biro SDM dan Umum dapat dilakukan pelantikan untuk mengisi formasi tersebut.

- f) Penyusunan Analisis Jabatan ASN di Lingkungan Sekretariat Jenderal.

Sebagai upaya memetakan kesesuaian antara tuntutan tugas dengan jabatan dengan pegawai yang akan menduduki jabatan dalam organisasi, dilakukan penyusunan kembali Analisis Jabatan dan Analisis Beban di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI. penyusunan ANJAB dan ABK ini dilakukan oleh pegawai di Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi, dan Biro SDM dan Umum serta dibimbing oleh perwakilan Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN BKN.

No	JABATAN STRUKTURAL	ANJAB
1	Sekretaris Jenderal	√
2	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	√
3	Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi	√
4	Kepala Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	√
5	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	√
6	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	√
7	Inspektur	√
8	Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	√
9	Kepala Subbagian Pemeliharaan dan Rumah Tangga	√
10	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Penatausahaan Aset	√
11	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	√
12	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	√
13	Kepala Bagian Fasilitasi Pimpinan dan Protokol	√
14	Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan	√
15	Kepala Subbagian Persidangan dan Penyiapan Bahan	√
16	Kepala Subbagian Protokol	√
17	Kepala Subbagian Biro Perencanaan dan Keuangan	√

18	Kepala Subbagian Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi	√
19	Kepala Subbagian Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	√
20	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat	√

PELAKSANA		
1	Penelaah Teknis Kebijakan	√
2	Pengadministrasi Perkantoran	√
3	Pengolah Data dan Informasi	√
4	Penata Keprotokolan	√
5	Pengelola Keprotokolan	√
6	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	√
7	Dokumentalis Hukum	√
8	Pengelola Layanan Pengadaan	√
9	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	√
10	Pengelola Layanan Operasional	√
11	Operator Layanan Operasional	√
12	Jurnalis	√
13	Pengendali Konten Internet	√

g) Pemenuhan Data Dukung Pelaksanaan Penilaian NSPK.

Dalam melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI nomor 432 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara Tahun 2023, dilakukan pemenuhan data dukung yang diminta dalam rencana aksi yang di upload ke dalam aplikasi penilaian <https://indeksnspk.bkn.go.id>

RENCANA AKSI HASIL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IMPLEMENTASI NSPK (NORMA, STANDAR, PROSEDURE, dan KRITERIA) MANAJEMEN ASN TAHUN 2023									
No	Kegiatan Utama	Nilai	Standar	Gap (%)	Rank	Catatan:	Rencana Aksi	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
								Unit Kerja	Pelaksana
1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan	7,67	B	4%	7	Instansi belum sepenuhnya menerapkan ketentuan: 1. Peraturan Menteri PAN-8B No. 1 Tahun 2020; 2. Peraturan BKN No. 9 Tahun 2022.	Instansi perlu terus berkomitmen untuk menerapkan NSPK terkait Penyusunan dan Perencanaan kebutuhan ASN dengan memperhatikan: 1. Metode penyusunan; 2. Validasi dan penetapan hasil penyusunan; 3. Penyampaian kebutuhan ASN kepada instansi terkait.	Biro Hukum, Kerjasama dan Organisasi	Koordinator: Yuri Susila Dewi Anggota: Ananda Eida Resti
2	Pengadaan ASN	0,00	F	100%	17	Instansi tidak dalam periode implementasi NSPK pada elemen Pengadaan ASN sesuai dengan ketentuan: 1. Peraturan Menteri PAN-8B Nomor 27 Tahun 2021; 2. Peraturan Menteri PAN-8B Nomor 52 Tahun 2021; 3. Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018.	Instansi perlu terus berkomitmen untuk menerapkan NSPK terkait pengadaan ASN dengan memperhatikan: 1. Keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan 2. Ketentuan teknis pengadaan ASN	Biro Hukum, Kerjasama dan Organisasi dan Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Koordinator: Yuri Susila Dewi Anggota: 1. Ananda Eida Resti 2. Virgian Adi Saputra

Nama Elemen	Bobot	Jumlah Indikator	Status	Aksi
Penyusunan dan Penetapan Kebijakan RDB 2023	8	4	LENGKAP	[Edit]
Pengadaan ASN 2023	7	4	LENGKAP	[Edit]
Pengembangan ASN 2023	7	8	LENGKAP	[Edit]
Jabatan 2023	8	18	REVISI LENGKAP	[Edit]
Rekrutur 2023	6	4	LENGKAP	[Edit]
Pada Kekuasaan 2023	7	1	LENGKAP	[Edit]
Pengembangan Kader ASN 2023	7	4	LENGKAP	[Edit]
Rekrutur 2023	6	3	LENGKAP	[Edit]
Pengembangan Kader 2023	7	4	LENGKAP	[Edit]

2) Fasilitasi Reformasi Birokrasi;

Sejak awal tahun 2023 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) telah dihentikan yang berkaitan dengan rencana percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang bertujuan menyelesaikan masalah pembangunan dan penyetaraan posisi Indonesia di kancah internasional. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan melakukan perubahan pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan metodologi penilaian yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sehubungan dengan hal tersebut Kelompok Kerja Fasilitasi Reformasi Birokrasi lebih banyak menghadiri kegiatan sosialisasi dan *talkshow* terkait kebijakan yang akan ditetapkan mengenai Perubahan *Road Map* 2020-2024 dan metodologi penilaian.

Melakukan fasilitasi indikator keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dimiliki oleh Ombudsman Republik Indonesia, yaitu Survei Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik untuk tercantum pada kebijakan Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Melakukan identifikasi dan analisis terhadap perubahan-perubahan yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, untuk kemudian dapat dijadikan acuan dalam melakukan penyesuaian terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi

Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang diatur pada Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 351 Tahun 2020.

Rencana Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi

1. Fasilitasi Penyesuaian *Road Map* RB sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

a. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ombudsman RI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia tahun 2020-2024 sebelum perubahan telah memasuki tahun ketiga sampai dengan tahun 2022. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola internal, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta penguatan pengawasan melalui pembangunan Zona Integritas (ZI). Beberapa capaian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia sampai dengan periode terakhir tahun 2022 dengan menggunakan *Road Map* Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia tahun 2020-2024 sebelum perubahan sebagai acuan :

1) Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan

Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan sejak terbentuknya struktur Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Langkah awal yang dilakukan tergambar dari struktur organisasi Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia yang terakhir dimana terdiri dari 5 (lima) Biro dan 1 (satu) Inspektorat dengan komposisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebanyak 1 (satu) orang, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 6 (enam) orang, Jabatan Administrator sebanyak 3 (tiga) orang, dan Jabatan Pengawas 11 (sebelas) orang.

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI				
Jabatan	Persekjen 1/2018	Persekjen 5/2020	Persekjen 4/2021	Persekjen 2/2022
JPT Madya	1	1	1	1
JPT Pratama	6	6	6	6

Administrator	17	2	3	3
Pengawas	46	9	11	11

Gambar 1.1 Tabel Penyederhanaan Struktur dan Penyetaraan Jabatan

- 2) Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi Ombudsman Republik Indonesia telah berkomitmen untuk menciptakan tata kelola internal yang mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada penggunaan layanan. Hal ini dibuktikan dengan hasil indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Ombudsman Republik Indonesia tahun 2022 dengan nilai 3.01 (kategori baik). Disamping itu, Ombudsman Republik Indonesia juga sedang menyusun arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta sedang berada pada tahap pembangunan *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)* sebagai upaya penguatan terhadap ketahanan dan keamanan siber.
- 3) Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap akuntabilitas kinerja pada tahun 2022, Ombudsman Republik Indonesia mencapai nilai sebesar 67,05 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja Ombudsman Republik Indonesia sudah baik, yaitu pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang ada sudah baik khususnya

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,78
2.	Pengukuran Kinerja	30	17,34
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,17
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,76
Nilai Hasil Evaluasi		100	67,05
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

pada unit kerja utama, namun masih adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Gambar 1.2 Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

- 4) Penguatan Pengawasan Melalui Pembangunan Zona Integritas (ZI) Langkah Pembangunan Zona Integritas (ZI) telah dimulai oleh Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2022, dimana terdapat 10 (sepuluh) unit kerja di Ombudsman Republik Indonesia yang diusulkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yaitu :

- a) Keasistenan Utama Manajemen Mutu;
- b) Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi;
- c) Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung;
- d) Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali;
- e) Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- f) Ombudsman Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- g) Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- h) Ombudsman Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- i) Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- j) Ombudsman Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan hasil seleksi administrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari 10 (sepuluh) unit kerja yang diusulkan Ombudsman Republik Indonesia terdapat 5 (lima) unit kerja yang lulus pada tahapan tersebut yaitu : Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung, Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali, dan Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

- 5) Progress capaian Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia juga Indeks Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Pergerakan Indeks Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia yang cenderung meningkat dalam periode tersebut menunjukkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia memiliki upaya dan komitmen secara kontinyu dalam menciptakan birokrasi pemerintahan yang berkualitas.



Gambar 1.3 Indeks Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia 2019-2022

Pasca tersusunnya perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia tahun 2020-2024, maka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia bertujuan untuk menciptakan lingkungan birokrasi Ombudsman Republik Indonesia yang bersih, efektif dan berdaya saing guna mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Pada akhir periode Road Map Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia tahun 2020-2024 akan dilakukan pengukuran pencapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan menggunakan indikator-indikator dan juga akan dilakukan evaluasi pencapaiannya setiap tahun sebagai dasar bagi pengambilan keputusan terkait strategi Reformasi Birokrasi pada berbagai tingkatan. Oleh karena itu, Ombudsman Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga yang masuk dalam penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi diharapkan memberikan kontribusi guna menyelesaikan setiap masalah yang muncul dengan cepat, tepat, dan efisien. Penentuan tujuan Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia ini diarahkan untuk turut memberikan andil dalam menjawab isu tata kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian pembangunan nasional dan kualitas pelayanan publik yang belum prima. Pada Peraturan Menteri tersebut mengamanatkan Kementerian/Lembaga untuk melakukan penetapan pelaksanaan reformasi birokrasi general dan tematik sampai dengan tahun 2024.

2. Fasilitasi Penyesuaian Road Map RB sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Pengawasan Pelayanan Publik berkomitmen melakukan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi Ombudsman RI sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 terlihat trend kenaikan dengan nilai terakhir yang diraih kategori “BB” atau perdikat “Baik”.

Penerapan Reformasi Birokrasi Ombudsman RI sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Ombudsman RI tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Nomor 351 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Ombudsman RI perlu menyesuaikan melalui

penajaman Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 327 Tahun 2023 RI tentang Road Map Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024

Tujuan Reformasi Birokrasi Ombudsman RI sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi nasional yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Hal ini juga berlaku pada sasaran Reformasi Birokrasi Ombudsman RI yang sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi nasional terdiri atas: 1) terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel; dan 2) budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional.

Untuk Reformasi Birokrasi General, Ombudsman RI menerapkan seluruh Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General secara mandatory untuk tahun 2023-2024. Namun demikian, terdapat prioritas Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General untuk pelaksanaan masing-masing tahun 2023 dan 2024 yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk rencana aksi tahunan. Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General yang belum menjadi prioritas di antaranya mempertimbangkan belum tersedia regulasi yang mengatur instrumen evaluasi untuk mengukur indikator Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General dari Kementerian/Lembaga tingkat Meso atau Leading Institution.

Untuk Reformasi Birokrasi Tematik, Ombudsman RI menetapkan 5 (Lima) tema dalam penerapan Reformasi Birokrasi Tematik tahun 2023-2024 yang dalam pelaksanaannya berkolaborasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) yang meliputi: 1) Pengentasan Kemiskinan; 2) Peningkatan Investasi; 3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dalam Negeri; 4) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan 5) Pengendalian Inflasi.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ombudsman RI dikelola oleh Tim Reformasi Birokrasi General Ombudsman RI yang terdiri atas Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, dan Masing-masing Kelompok Kerja Kegiatan Utama yang keanggotaannya meliputi dari seluruh unit kerja, untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik dibentuk Tim pada setiap tema, keanggotaan dalam Tim pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik ditunjuk berdasarkan kesesuaian tugas dan fungsi unit kerja dengan tema yang dipilih. serta Tim Evaluator Internal, merupakan Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik dilaksanakan secara sinergis oleh Tim Pengelola dan Tim Evaluator Internal secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

No	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Base Line	Target	
					2023	2024
1	Pengentasan Kemiskinan	Penyelenggaraan pengawasan PPDB di 34 Provinsi untuk mendukung akses pendidikan bagi siswa miskin	Jumlah pengawasan Ombudsman terhadap penyelenggaraan PPDB	15 (Perwakilan)	28 (Perwakilan)	34 (Perwakilan)
			Koordinasi penyampaian perbaikan sistemik penyelenggaraan PPDB dengan K/L/D terkait	1 (Kegiatan)	2 (Kegiatan)	5 (Kegiatan)
2	Peningkatan Investasi	Pengawasan pelayanan perizinan investasi terpadu	Persentase Nilai Kepatuhan penyelenggaraan pelayanan perizinan investasi terpadu yang baik	63,55%	67,30%	71,62%

No	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Base Line	Target	
					2023	2024
3	Digitalisasi Pemerintah	Peningkatan akses pengaduan masyarakat secara digital (pengaduan <i>online</i> Ombudsman RI) terkait <i>stunting</i>	Jumlah Laporan Masyarakat terkait <i>stunting</i> secara digital	N/A	34 Jumlah Laporan Masyarakat	68 Jumlah Laporan Masyarakat
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Ombudsman RI	Persentase penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Ombudsman RI	95% (Siswas P3DN)	95,5% (Siswas P3DN)	96% (Siswas P3DN)
5	Pengendalian Inflasi	Pengawasan penyaluran bantuan pangan (beras) Pemerintah	Jumlah kegiatan monitoring dan koordinasi penyaluran bantuan pangan	N/A	4 Kegiatan	34 Kegiatan
			Jumlah wilayah yang dilakukan inspeksi atas kegiatan penyaluran bantuan pangan	N/A	4 Provinsi	34 Provinsi

Tabel 1.3 Penetapan Target Reformasi Birokrasi Tematik

3. Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi *General*

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan beberapa pasal dalam Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020, maka Ombudsman RI perlu melakukan penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi *General* yang terdiri dari 26 Indikator yaitu :

1. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi
2. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
3. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
4. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
5. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)
6. Indeks Perencanaan Pembangunan
7. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SPBE)
8. Tingkat Digitalisasi Arsip
9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
10. Indeks Pengelolaan Aset

11. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan
12. Indeks Kualitas Kebijakan
13. Indeks Reformasi Hukum
14. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor
15. Indeks Tata Kelola Pengadaan
16. Indeks Sistem Merit
17. Indeks Pelayanan Publik
18. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
19. Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SPBE)
20. Capaian Prioritas Nasional
21. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
22. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
23. Tindak Lanjut Rekomendasi
24. Indeks BerAKHLAK
25. Survei Penilaian Integritas (SPI)
26. Survei Kepuasan Masyarakat

Sebagai upaya dalam penyusunan rencana aksi, berbagai kegiatan telah dilakukan yaitu:

1. Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 tanggal 6 April 2023/Daring, Zoom Meeting;
 2. Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia tanggal 11 Agustus 2023/Daring, *Zoom Meeting*; dan
 3. Pendampingan tim-tim Reformasi Birokrasi General Ombudsman Republik Indonesia dalam penyusunan Rencana Aksi;
4. Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik
1. Rapat Intensif Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia 2020-2024 tanggal 24-26 Mei 2023/The Groove Suites (penyusunan Skala Prioritas Reformasi Birokrasi General, Target Reformasi Birokrasi General, Skala Prioritas Reformasi Birokrasi Tematik, dan Target Reformasi Birokrasi Tematik);
 2. Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia tanggal 26 Juni 2023/Daring, Zoom Meeting;

3. Rapat Intensif Penentuan Tema Reformasi Birokrasi Tematik dan Penyusunan Skala Prioritas Tema Reformasi Birokrasi Tematik Ombudsman Republik Indonesia tanggal 13-14 Juli 2023/ Park Hotel Cawang;
4. *Benchmarking* terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tanggal 7 Agustus 2023/Kantor Pusat BPOM RI;
5. Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia tanggal 11 Agustus 2023/Daring, Zoom Meeting;
6. Rapat Tindaklanjut Rapat Pimpinan 16 Agustus 2023 perihal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Ombudsman Republik Indonesia tanggal 23 Agustus 2023/R.Rapat Biro HKO, Lt.4;
7. Pendampingan tim-tim Reformasi Birokrasi General Ombudsman Republik Indonesia dalam penyusunan Rencana Aksi;dan
8. Rapat Pembahasan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik Ombudsman Republik Indonesia tanggal 14 September 2023/R.Rapat Biro HKO, Lt.4.

1) Penentuan Skala Prioritas Kegiatan Utama

No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Mandat General Nasional	Tingkat Keparahan (Impelementasi Rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	10	1	1	12
		Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	10	5	8	23
		Pelaksanaan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional	Indeks SPBE	10	6	8	24
			Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE				
		Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi	Indeks Rencana Pembangunan	10	6	9	25
			Nilai SAKIP				
		Pembangunan Zona Integritas (ZI) di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	10	8	9	27
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	10	5	9	24
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	10	5	6	21
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	10	5	7	22		

No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Mandat General Nasional	Tingkat Keparahan (Impelementasi Rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
		Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	10	6	8	24
		Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	10	4	6	20
		Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	10	8	9	27
		Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	10	7	8	25
		Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	10	4	5	20
		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	10	5	8	23
			Tindak Lanjut Rekomendasi BPK				
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran							
Indeks Pengelolaan Aset							
2	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	10	7	10	27
		Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	10	8	7	25
		Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN	10	8	9	27
		Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	10	3	3	16

No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Mandat General Nasional	Tingkat Keparahan (Impelementasi Rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
		Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	Indeks BerAKHLAK	10	9	9	29
			<i>Employee Branding</i>				
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	10	4	5	
			Indeks Pelayanan Publik (IPP)				

2) Penentuan Target Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline	Target Tahun		Unit Kerja	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,01	3,05	3,10	Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	Seluruh Unit Kerja
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	-	-	-	Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	Seluruh Unit Kerja
2	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	-	-	-	Biro Perencanaan dan Keuangan	Seluruh Unit Kerja

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline	Target Tahun		Unit Kerja	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	67,05	75,00	78,00	Biro Perencanaan dan Keuangan	Seluruh Unit Kerja
3	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	0	1	2	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
4	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	-	-	-	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Seluruh Unit Kerja Sekretariat Jenderal
5	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	-	-	-	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Seluruh Unit Kerja Sekretariat Jenderal
6	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	78,58	80	81	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Seluruh Unit Kerja
7	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	Indeks Berakhlak*	-	-	-	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Seluruh Unit Kerja Sekretariat Jenderal
		Employeer Branding*	-	-	-	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Seluruh Unit Kerja Sekretariat Jenderal

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline	Target Tahun		Unit Kerja	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
8	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	79,21	80	81	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
9	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	57,70	58,00	58,00	Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi	Seluruh Unit Kerja
10	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Biro Perencanaan dan Keuangan	Seluruh Unit Kerja
		Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	76,83%	80%	82,5%	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Khusus Kementerian/Lembaga)	92,52	93,00	93,50	Biro Perencanaan dan Keuangan	Seluruh Unit Kerja
		Indeks Pengelolaan Aset (Khusus Kementerian/Lembaga)	3,10	3,15	3,20	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Seluruh Unit Kerja
11	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,9	1,8	1,9	Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	Seluruh Unit Kerja
12	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	71,30	75,00	77,00	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Seluruh Unit Kerja
13	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,00	3,25	3,30	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline	Target Tahun		Unit Kerja	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
14	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	334	334	336	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Seluruh Unit Kerja
15	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	-	-	-	Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi	Seluruh Unit Kerja Sekretariat Jenderal
16	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	3,19	3,25	3,30	Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat	Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,28	4,30	4,32	Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat	Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat
17	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	-	-	-	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Seluruh Unit Kerja Sekretariat Jenderal
18	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	89,36	91,49	93,62	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
19	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	93,60	93,75	94,00	Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi	Seluruh Unit Kerja
20	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	-	-	-	Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi	Seluruh Unit Kerja Sekretariat Jenderal

Di Triwulan IV Fasilitasi Reformasi Birokrasi melakukan kegiatan, antara lain;

1. Fasilitasi Penyusunan Surat Keputusan Ketua Nomor 355 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi *General* di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023

Sesuai dengan mandat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi *General* yang terdiri dari 20 Kegiatan Utama dan 26 Indikator Kegiatan Utama adapun tujuan dari Surat Keputusan tersebut sebagai dokumen perencanaan serta acuan dalam pelaksanaan pada masing-masing unit kerja untuk melakukan pelaksanaan reformasi birokrasi *general* di lingkungan Ombudsman RI pada tahun 2023 sesuai dengan rincian kolom kegiatan utama, indikator kegiatan utama, target tahun 2023, rencana aksi, output, target penyelesaian, anggaran, unit kerja.



2. Fasilitasi Penyusunan Surat Keputusan Ketua Nomor 376 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi RB Tematik di Lingkungan Ombudsman RI Tahun 2023

Dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 maka masing-masing instansi perlu melakukan reformasi birokrasi tematik yang mana dalam pelaksanaannya terdapat 5 (lima) tema yaitu:

- a. Pengentasaan kemiskinan,
- b. Peningkatan investasi,

- c. Digitalisasi administrasi pemerintah (*Stunting*)
- d. Percepatan prioritas aktual Presiden:
 - 1) Penggunaan produk dalam negeri
 - 2) Pengendalian Inflasi

Menindaklanjuti hal tersebut Ombudsman RI telah menetapkan Surat Keputusan Ketua Nomor 376 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi RB Tematik di Lingkungan Ombudsman RI Tahun 2023, yang didalamnya meliputi 5 tema diatas.

No	Tema	Sasaran Tematik Ombudsman RI
1	Pengentasaan kemiskinan	Penyelenggaraan pengawasan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di 34 Provinsi untuk mendukung akses pendidikan siswa miskin
2	Peningkatan investasi	Pengawasan pelayanan investasi terpadu
3	Digitalisasi administrasi pemerintah (<i>Stunting</i>)	Peningkatan akses pengaduan masyarakat secara digital (pengaduan <i>online</i> Ombudsman RI terkait <i>Stunting</i>)
4	Penggunaan produk dalam negeri	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
5	Pengendalian Inflasi	Pengawasan penyaluran bantuan pangan (beras) Pemerintah



3. Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Ombudsman RI Tahun 2023

Dalam rangka memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi serta dampak positif terhadap pembangunan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ombudsman RI, pelaksanaan reformasi birokrasi general melibatkan seluruh unit kerja Sekretariat Jenderal

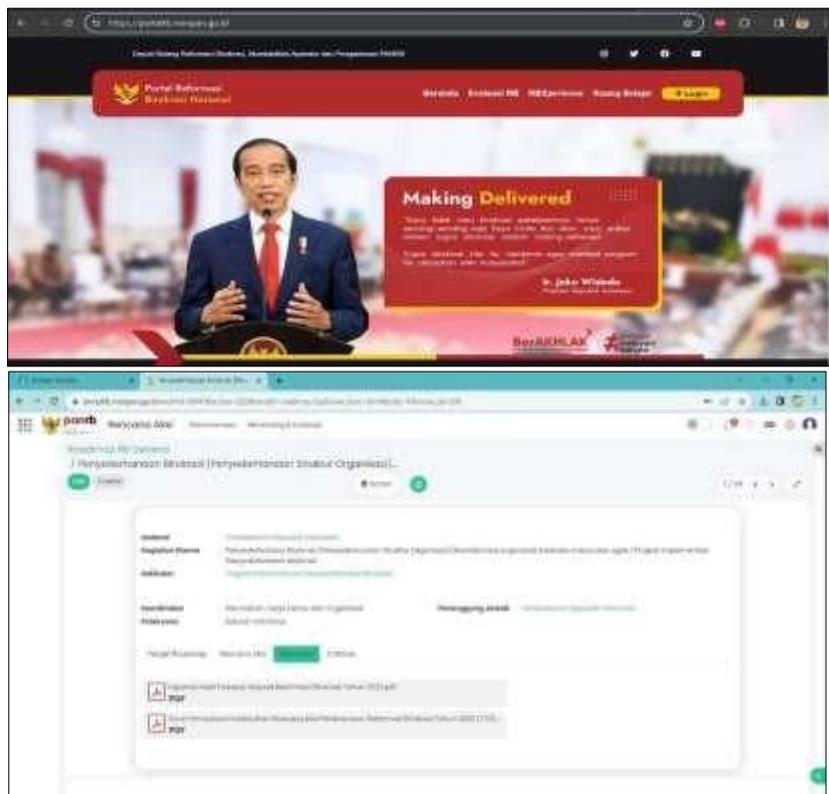
dengan dikawal oleh Tim Penilai Internal (Inspektorat) melalui teknik wawancara atas capaian pada masing-masing kegiatan rencana aksi.

4. **Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Ombudsman RI Tahun 2023**

Bahwa untuk mempercepat terwujudnya hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan instrumen evaluasi reformasi birokrasi yang lebih sederhana berfokus pada hasil dan penguatan kolaborasi dalam pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi tematik Ombudsman RI melibatkan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar memastikan kesesuaian tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak kepada pihak eksternal.

5. **Penginputan Portal Reformasi Birokrasi Nasional**

Dalam pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengarahkan dilakukan melalui Portal Reformasi Birokrasi Nasional dengan alamat website <https://portalrb.menpan.go.id/> , adapun yang dilakukan penginputan antara lain kegiatan rencana aksi, target tahun 2023, anggaran, dan Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) baik pelaksanaan reformasi birokrasi general dan tematik.



6. Penyampaian Laporan Forum Komunikasi Publik dan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 ke KemenPANRB serta Laporan Survei Kepuasan Masyarakat

Kewajiban Penyampaian Laporan Forum Komunikasi Publik (FKP) dan Laporan Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun 2022 sesuai dengan:

- a. Pasal 39, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik untuk mengikutsertakan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik yang mengamanatkan bahwa Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) wajib melakukan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan melaporkan hasilnya kepada Menteri PANRB; dan
- c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib memantau pelaksanaan dan tindak lanjut hasil FKP yang diselenggarakan oleh Instansi masing-masing;

Adapun pelaporan pelaksanaan FKP Tahun 2023 dan Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun 2022 disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi c.q. Deputi Bidang Pelayanan Publik melalui <https://bit.ly/pelaporansk>



7. Rasionalisasi target pada pelaksanaan reformasi birokrasi general sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023

Sehubungan telah terbitnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023, maka Ombudsman RI melakukan penyesuaian target pada masing-masing indikator pelaksanaan reformasi birokrasi general sesuai dengan definisi operasional indikator keberhasilan evaluasi reformasi birokrasi tahun 2023 yang tertuang pada surat keputusan tersebut.

NO	REFORMASI	IND	TGT		Capaian 2023	PKC	Keberhasilan Target	Target Pada Road Map
1	A. Masing Pelaksanaan	10	Bobot	Harapan Nilai	Target 2023			
2		Pendidikan						
1	Revisi Akad Pembudayaan RB General	1	0-100	-	SK Ketua Ombudsman RI Nomor 255 Tahun 2023	Ber-inko-Dan Insektorial		
2	Profil Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	2	0-100	-	Laporan Triwulanan, SAKUV (HR) RB General Ombudsman RI	Inspektoral (IR)		
3	B. Kualitas Pelaksanaan Kebijakan RB	40						
1	WAKTU PENYERAHAN (Versi 1)	14						
1	Persentase Penyisihan Struktur Organisasi	2	0-100	100%	100% (Capaian Internal)	Ber-inko	Nilai 0-100.00%	N/A

8. Menghadiri kegiatan RBXperience dan Penyerahan Hasil Evaluasi RB, AKIP, dan ZI Tahun 2023

Dalam rangka perubahan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) melalui Penajaman Road Map RB dan percepatan penyebaran praktik baik pelaksanaan RB, Kedepkatan Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB akan menyelenggarakan kegiatan bertajuk “RB Xperience dan Penyerahan Hasil Evaluasi RB, AKIP, dan ZI Tahun 2023”. Kegiatan

ini akan menjadi wadah berbagi ilmu dan pengalaman praktik baik RB dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik.

RBXperience akan terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

- a. *Peer Teaching* Memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah percontohan (*best practice*) dalam RB untuk menunjukkan dan membagikan pengalaman/strategi implementasi RB (knowledge sharing) kepada audiens atau instansi pemerintah lainnya untuk memiliki kemampuan strategis dalam rangka mengakselerasi capaian RB.
- b. *Coaching Clinic* Memberikan kesempatan bagi instansi pemerintah untuk berinteraksi langsung dan konsultasi intensif kepada K/L pengampu Meso dalam rangka memperoleh input bagi perbaikan implementasi RB.
- c. Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi RB, SAKIP dan ZI 2023 Sebagai rangkaian akhir dari kegiatan RB Xperience, akan dilakukan Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi RB, SAKIP, dan ZI Tahun 2023 kepada instansi pemerintah oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tujuan Kegiatan RB Xperience dan Apresiasi Penyerahan Hasil Evaluasi RB Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman instansi pemerintah terhadap implementasi kebijakan RB dan RB Tematik
- b. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah dalam rangka percepatan pencapaian RB berdampak.
- c. Memberikan apresiasi kepada instansi pemerintah atas capaian RB secara instansional.
- d. Memberikan informasi kepada masyarakat atas capaian RB pemerintah selama tahun 2023.

1) Fasilitasi Tatalaksana

- a) Reviu SOP sebanyak 101 (Seratus Satu) SOP.

No	Nama SOP	Unit Kerja
1	SOP Penerimaan Laporan Masyarakat Datang Langsung	KU DUMAS
2	SOP Penerimaan Laporan Masyarakat Melalui E-mail dan Website	KU DUMAS
3	SOP Penerimaan Laporan Masyarakat Melalui Surat	KU DUMAS
4	SOP Penerimaan Laporan Masyarakat Melalui Telepon	KU DUMAS
5	SOP Registrasi Laporan Kategori Respon Cepat Ombudsman (RCO)	KU DUMAS

6	SOP Verifikasi Syarat Formil dan Materil	KU DUMAS
7	SOP Surat Permintaan Kelengkapan Data	KU DUMAS
8	SOP Penutupan Laporan Masyarakat Tidak Memenuhi Syarat Formil	KU DUMAS
9	SOP Penugasan Laporan Masyarakat ke Perwakilan	KU DUMAS
10	SOP Penolakan Laporan Masyarakat	KU DUMAS
11	SOP Distribusi Laporan Masyarakat Kepada Unit Pemeriksa	KU DUMAS
12	SOP Distribusi Penyerahan Laporan dari Perwakilan	KU DUMAS
13	SOP Distribusi Penugasan Laporan dari Pusat	KU DUMAS
14	SOP Distribusi Penyerahan Laporan dari Perwakilan	KU DUMAS
15	SOP Perwakilan Penerimaan Laporan Masyarakat Datang Langsung	KU DUMAS
16	SOP Perwakilan Penerimaan Laporan Masyarakat Melalui E-mail dan Website	KU DUMAS
17	SOP Perwakilan Penerimaan Laporan Masyarakat Melalui Surat	KU DUMAS
18	SOP Perwakilan Penerimaan Laporan Masyarakat Melalui Telepon/Whatsapp	KU DUMAS
19	SOP Perwakilan Registrasi Laporan Kategori Respon Cepat Ombudsman (RCO)	KU DUMAS
20	SOP Perwakilan Verifikasi Syarat Formil dan Materil	KU DUMAS
21	SOP Perwakilan Surat Permintaan Kelengkapan Data	KU DUMAS
22	SOP Perwakilan Penutupan Laporan Masyarakat Tidak Memenuhi Syarat Formil	KU DUMAS
23	SOP Perwakilan Penyerahan Laporan Masyarakat ke Pusat	KU DUMAS
24	SOP Perwakilan Pelimpahan Laporan Masyarakat Dari Perwakilan Ombudsmn ke Perwakilan Ombudsman Lain	KU DUMAS
25	SOP Perwakilan Penolakan Laporan Masyarakat	KU DUMAS
26	SOP Perwakilan Distrubusi Laporan Masyarakat Kepada Unit Pemeriksa	KU DUMAS
27	SOP Perwakilan Tata Cara Pengelolaan Surat Tembusan	KU DUMAS
28	SOP Tata Laksana Tahapan Deteksi Pusat	KU MPM
29	SOP Tata Laksana Tahapan Deteksi Perwakilan	KU MPM
30	SOP Tata Laksana Tahapan Analisis Pusat	KU MPM
31	SOP Tata Laksana Tahapan Analisis Perwakilan	KU MPM
32	SOP Pengumpulan Data Survei	KU MPM
33	1.1. SOP Pemeriksaan Pengaduan Atas Kegiatan Dalam Proses	KU MM
34	1.2. SOP Monitoring Pemeriksaan Pengaduan atas Kegiatan Masih Dalam Proses	KU MM

35	2.1 SOP Pemeriksaan Pengaduan Atas Kegiatan Telah Terbit Produk	KU MM
36	2.2. SOP Monitoring Pemeriksaan Pengaduan atas Kegiatan Telah Terbit Produk Akhir	KU MM
37	3.1 SOP Perencanaan Penjaminan Mutu Penyelesaian LM	KU MM
38	3.2 SOP Penyiapan Bahan Penjaminan Mutu Penyelesaian LM	KU MM
39	3.3 SOP Pelaksanaan Penjaminan Mutu Penyelesaian LM	KU MM
40	3.4 SOP Pelaporan Penjaminan Mutu Penyelesaian LM	KU MM
41	3.5.1 SOP Monitoring Penjaminan Mutu Penyelesaian LM via Telepon	KU MM
42	3.5.2 SOP Monitoring Penjaminan Mutu Penyelesaian LM via Surat	KU MM
43	3.5.3 SOP Monitoring Penjaminan Mutu Penyelesaian LM via Kunjungan Langsung	KU MM
44	3.6 SOP Pelaporan Monitoring Penjaminan Mutu Penyelesaian LM	KU MM
45	4.1 SOP Perencanaan Penjaminan Mutu Kajian Pencegahan Maladministrasi	KU MM
46	4.2 SOP Penyiapan Bahan Penjaminan Mutu Kajian Pencegahan Maladministrasi	KU MM
47	4.3.1 SOP Pelaksanaan Penjaminan Mutu Kajian Pencegahan Maladministrasi (Deteksi dan Analisis)	KU MM
48	4.3.2 SOP Pelaksanaan Penjaminan Mutu Kajian Pencegahan Maladministrasi (PPS)	KU MM
49	4.4 SOP Pelaporan Penjaminan Mutu Kajian Pencegahan Maladministrasi	KU MM
50	4.5.1 SOP Monitoring Penjaminan Mutu Kajian Pencegahan Maladministrasi via Telepon	KU MM
51	4.5.2 SOP Monitoring Penjaminan Mutu Kajian Pencegahan Maladministrasi via Surat	KU MM
52	4.5.3 SOP Monitoring Penjaminan Mutu Kajian Pencegahan Maladministrasi via Kunjungan Langsung	KU MM
53	4.6 SOP Pelaporan Monitoring Penjaminan Kajian Pencegahan Masyarakat	KU MM
54	SOP Penerimaan LAHP dan Berkas Laporan	KU RESMON
55	SOP Pertemuan Pendahuluan Pengelolaan LAHP	KU RESMON
56	SOP Rapat Pembahasan Pengelolaan LAHP	KU RESMON
57	SOP Penugasan Mediator	KU RESMON
58	SOP Pelaksanaan Mediasi	KU RESMON
59	SOP Monitoring Kesepakatan Mediasi	KU RESMON
60	SOP Penyelesaian Mediasi dan Penutupan Laporan	KU RESMON

61	SOP Penulisan Draf Rekomendasi	KU RESMON
62	SOP Koreksi Draf Rekomendasi Oleh KKKU I-VII Asisten Penyelesaian Laporan Perwakilan	KU RESMON
63	SOP Koreksi Draf Rekomendasi oleh Pimpinan Ombudsman	KU RESMON
64	SOP Reviu Draf Rekomendasi oleh KU Manajemen Mutu	KU RESMON
65	SOP Persetujuan Terhadap Draf Rekomendasi	KU RESMON
66	SOP Finalisasi Draf Rekomendasi Pasca Persetujuan	KU RESMON
67	SOP Penyampaian Rekomendasi	KU RESMON
68	SOP Monitoring Rekomendasi Tahap I	KU RESMON
69	SOP Monitoring Rekomendasi Tahap II	KU RESMON
70	SOP Penugasan Monitoring kepada Perwakilan	KU RESMON
71	SOP Penetapan Status Pelaksanaan Rekomendasi	KU RESMON
72	SOP Pelaporan kepada Presiden dan DPR	KU RESMON
73	SOP Publikasi Terlapor dan atasan Terlapor	KU RESMON
74	SOP Penyelesaian Mekanisme Rekomendasi	KU RESMON
75	SOP Disposisi Pemeriksaan ke Asisten	KU I-VII
76	SOP Pemberitahuan Dimulainya Pemeriksaan	KU I-VII
77	SOP Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan Dokumen (LHPD)	KU I-VII
78	SOP Bedah Laporan Klasifikasi Sedang/Berat	KU I-VII
79	SOP Permintaan Informasi dan/atau data tambahan ke Pelapor	KU I-VII
80	SOP Permintaan Informasi dan/atau data tambahan ke Terlapor	KU I-VII
81	SOP Permintaan klarifikasi Tertulis kepada Terlapor dan atau Pihak Terkait	KU I-VII
82	SOP Permintaan Klarifikasi Langsung Kepada Terlapor dan atau Pihak Terkait	KU I-VII
83	SOP Permintaan Klarifikasi Lanjutan Secara Tertulis Kepada Pelapor, Terlapor dan/atau Pihak Terkait	KU I-VII
84	SOP Permintaan Klarifikasi Lanjutan Secara Langsung (Tatap Muka) Kepada Pelapor, Terlapor dan/atau Pihak Terkait	KU I-VII
85	SOP Pemeriksaan Lapangan Terbuka	KU I-VII
86	SOP Pemeriksaan Lapangan Tertutup	KU I-VII
87	SOP Pemanggilan (I, II, dan III) Terlapor dan Pihak Terkait	KU I-VII
88	SOP Penghadiran Paksa	KU I-VII
89	SOP Konsiliasi/Mediasi	KU I-VII
90	SOP Reaksi Cepat Ombudsman (RCO)	KU I-VII
91	SOP Pemberitahuan Perkembangan Pemeriksaan Laporan Secara Tertulis Kepada Pelapor	KU I-VII

- b) Pengesahan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal tentang penetapan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
 - Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi
 - Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 - Inspektorat
 - Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi

1. Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI.

MATRIKS PENYEDERHANAAN BIROKRASI
SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

No.	Unit Kerja	Struktur Jabatan Administrasi sebelum Disederhanakan			Struktur Jabatan Administrasi yang Berpotensi Dipertahankan			Struktur Jabatan Administrasi setelah Disederhanakan		
		III	IV	Jumlah	III	IV	Jumlah	III	IV	Jumlah
1	Inspektorat		1	1		1	1		1	1
2	Biro Perencanaan dan Keuangan	4	10	14		3	3		3	3
3	Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi	3	8	11		1	1		1	1
4	Biro Fasilitas Pelayanan Teknis/ Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	3	8	11		1	1		1	1
5	Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	3	6	9		1	1		1	1
6	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	4	11	15	2	4	6	2	4	6
	Total	A =		63	C =		11	B =		11

$$PSO = \frac{A - B}{A - C} \times 100\% \quad \frac{52}{52} \quad 100\% \quad 100\%$$

2. Penyusunan Proses Bisnis pada Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Sistem Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.

- Mekanisme Kerja dengan JPT Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Kerja.
- Sistem Kerja Unit Kerja dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Tinggi Pratama.
- Mekanisme Kerja Pejabat Administrator sebagai Penilai Kinerja.
- Sistem Kerja Unit Kerja dengan Jabatan Administrator.
- Mekanisme Kerja Pejabat Pengawas sebagai Penilai Kinerja.
- Sistem Kerja Unit Kerja dengan Jabatan Pengawas

3. Pendampingan dan Pengesahan SOP Biro SDMU pada Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan dan Pengawasan Manajemen SDM sebanyak 13 SOP, sebagaimana berikut:

- a. SOP Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pegawai
 - b. SOP Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai
 - c. SOP Permohonan Pelatihan Mandiri
 - d. SOP Permohonan Pelatihan Stakeholder
 - e. SOP Mekanisme Pengembangan Kompetensi Pegawai
 - f. SOP Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil
 - g. SOP Mengikuti Beasiswa Bagi PNS dan Asisten
 - h. SOP Tugas Belajar ASN
 - i. SOP Tugas Belajar Asisten
 - j. SOP Tugas Belajar Mandiri ASN
 - k. SOP Tugas Belajar Mandiri Asisten
 - l. SOP Pelatihan Penjenjangan Asisten
 - m. SOP Pengajuan Usulan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Asisten dengan Metode Pihak Ketiga
4. Finalisasi draf final SOP Keasistenan Pelaksanaan Perlakuan Saran dan Keasistenan Analisis pada Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi sebanyak 9 SOP, sebagaimana berikut:
- a. SOP Rencana Tindak Lanjut Perlakuan Pelaksanaan Saran pada Kantor Pusat
 - b. SOP Rencana Tindak Lanjut Perlakuan Pelaksanaan Saran pada Kantor Perwakilan
 - c. SOP Pelaksanaan Monitoring dan/atau Pendampingan Pelaksanaan Perlakuan Saran pada Kantor Pusat
 - d. SOP Pelaksanaan Monitoring dan/atau Pendampingan Pelaksanaan Perlakuan Saran pada Kantor Perwakilan
 - e. SOP Penyusunan Laporan Hasil Perlakuan Pelaksanaan Saran pada Kantor Pusat
 - f. SOP Penyusunan Laporan Hasil Perlakuan Pelaksanaan Saran pada Kantor Perwakilan
 - g. SOP Publikasi Pelaksanaan Perlakuan Saran pada Kantor Pusat
 - h. SOP Publikasi Pelaksanaan Perlakuan Saran pada Kantor Perwakilan
 - i. SOP Tata Laksana Tahapan Analisis pada Kantor Perwakilan
5. Penyusunan Arsitektur SPBE Domain Arsitektur Proses Bisnis dan layanan (*Enterprise Architecture*) dan pemetaan analisis *as-is* dan *to-be* di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

Di Triwulan IV Fasilitasi Tata Laksana melakukan kegiatan, antara lain;

**1. Fasilitasi Pelaksanaan Sinkronisasi kesesuaian draf Standar Operasional
Prosedur (SOP) Keasistenan Manajemen Pencegahan Maladministrasi**

- a. Pelaksanaan reviu draf final SOP Keasistenan Pelaksanaan Perlakuan Saran pada Kantor Pusat sebanyak 4 (empat) SOP bersama dengan unit kerja Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi, yaitu:
 - 1) SOP Rencana Tindak Lanjut Perlakuan Pelaksanaan Saran pada Kantor Pusat;
 - 2) SOP Pelaksanaan Monitoring dan/atau Pendampingan Pelaksanaan Perlakuan Saran pada Kantor Pusat;
 - 3) SOP Penyusunan Laporan Hasil Perlakuan Pelaksanaan Saran pada Kantor Pusat; dan
 - 4) SOP Publikasi Pelaksanaan Perlakuan Saran pada Kantor Pusat.
- b. Pelaksanaan reviu draf final SOP Keasistenan Pelaksanaan Perlakuan Saran dan Keasistenan Analisis pada Kantor Perwakilan bersama dengan unit kerja Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi sebanyak 4 (empat) SOP, yaitu:
 - 1) SOP Rencana Tindak Lanjut Perlakuan Pelaksanaan Saran pada Kantor Perwakilan;
 - 2) SOP Pelaksanaan Monitoring dan/atau Pendampingan Pelaksanaan Perlakuan Saran pada Kantor Perwakilan;
 - 3) SOP Penyusunan Laporan Hasil Perlakuan Pelaksanaan Saran pada Kantor Perwakilan; dan
 - 4) SOP Publikasi Pelaksanaan Perlakuan Saran pada Kantor Perwakilan.
- c. Pelaksanaan reviu draf final SOP Keasistenan Pelaksanaan Perlakuan Saran dan Keasistenan Analisis pada Kantor Perwakilan bersama dengan Keasistenan Pelaksanaan Perlakuan Saran Ombudsman Perwakilan Jawa Barat sebanyak 4 (empat) SOP, yaitu:
 - 1) SOP Rencana Tindak Lanjut Perlakuan Pelaksanaan Saran pada Kantor Perwakilan;
 - 2) SOP Pelaksanaan Monitoring dan/atau Pendampingan Pelaksanaan Perlakuan Saran pada Kantor Perwakilan;
 - 3) SOP Penyusunan Laporan Hasil Perlakuan Pelaksanaan Saran pada Kantor Perwakilan; dan
 - 4) SOP Publikasi Pelaksanaan Perlakuan Saran pada Kantor Perwakilan.

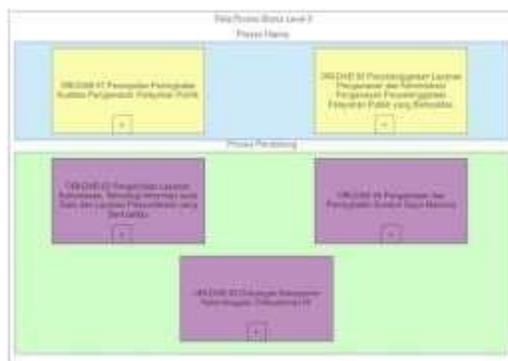
2. Pelaksanaan *Focus Group Discussion (FGD)* Pelatihan Modelling Kerangka Kerja Arsitektur SPBE pada Instansi Pusat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

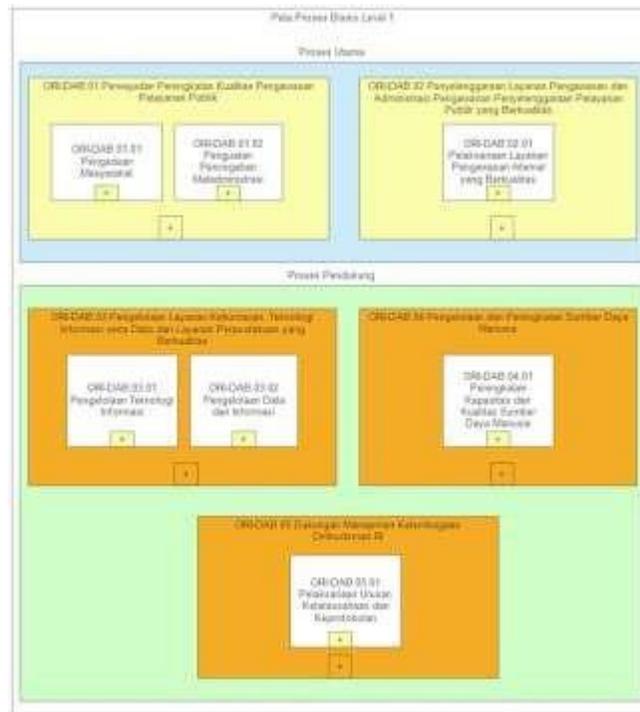
Kegiatan pelatihan modelling kerangka kerja arsitektur SPBE pada Instansi Pusat ini merupakan kegiatan ke-3 dari 4 rangkaian kegiatan yang diselenggarakan Kementerian PAN RB terkait pembuatan arsitektur SPBE. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi.



3. Pelaksanaan Pelatihan Modelling *Business Process Model and Notation (BPMN)* Arsitektur SPBE di lingkup Instansi Pusat

Dalam mendukung penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur SPBE Nasional, telah dilakukan pembinaan penyusunan Modelling Business Process Model and Notation (BPMN) Arsitektur SPBE pada Instansi Pusat. Adapun hasil yang telah dicapai dalam pelatihan tersebut adalah sebagai berikut:





4. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan di Lingkungan Ombudsman RI perlu dilakukan evaluasi dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Ombudsman RI sebagai panduan yang jelas dalam menjalankan berbagai kegiatan di dalam organisasi. Sebagai tindak lanjut hal tersebut telah dilakukan penetapan sebanyak 13 (tiga belas) Standar Operasional Prosedur (SOP) di Biro Sumber Daya Manusia dan Umum pada Kelompok Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) sebagai berikut:

5. Penyusunan Arsitektur SPBE Domain Arsitektur Proses Bisnis dan Layanan (*Enterprise Architecture*) dalam mendukung tata kelola pemerintah di Lingkungan Ombudsman

Dalam rangka mendukung penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur SPBE Nasional, dilakukan Penyesuaian uraian bisnis yang merupakan deskripsi dari urusan pemerintahan yang diselenggarakan sebagai salah satu pemenuhan dalam menyusun Arsitektur SPBE Domain Arsitektur Proses Bisnis dan Layanan (*Enterprise Architecture*) di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

C. KINERJA ANGGARAN

Kegiatan	Pagu-Revisi	Realisasi	Sisa	Persentase Realisasi
5093 Program Dukungan Manajemen Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi	3.469.263.000	3.435.780.218	33.482.782	99,03%
5093 Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.469.263.000	3.435.780.218	33.482.782	99,03%
957 Layanan Hukum	897.827.000	896.952.017	874.983	99,90%
051.0A Analisis Hukum dan Penyusunan Produk Hukum	660.370.000	660.060.893	309.107	99,95%
051.0B Kegiatan Dokumentasi dan Diseminasi Hukum	99.217.000	99.217.000	0	100%
051.0C Kegiatan Advokasi dan Ajudikasi	138.240.000	137.674.124	565.876	99,59%
958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2.202.600.000	2.170.357.400	32.242.600	98,54%
051 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	408.760.000	408.056.591	703.409	99,83%
052 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1.793.840.000	1.762.300.809	31.539.191	98,24%
960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	368.836.000	368.470.801	365.199	99,90%
051 Pengelolaan Organisasi dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi	338.964.000	338.610.001	353.999	99,90%
052 Pengelolaan, Penataan, dan Evaluasi Tata Laksana	29.872.000	29.860.800	11.200	99,95%



Pada Tahun 2023 Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi mengalami beberapa kali revisi anggaran. Hal tersebut terjadi dikarenakan untuk menunjang tugas dan fungsi Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi. Sampai dengan akhir Triwulan IV Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi mendapatkan anggaran sebesar Rp. 3.469.263.000,00, dan untuk Realisasi sebesar 99,03% atau Rp. 3.435.780.218,00.

BAB IV

PENUTUP

Demikian laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran kegiatan dan capaian yang telah dilaksanakan. Berdasarkan uraian capaian indikator tersebut, menunjukkan bahwa realisasi capaian target yang telah ditetapkan Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi tahun 2023 termasuk kategori berhasil.